

**ANALISIS AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PERJANJIAN ABRAHAM ACCORDS 2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

LALU DAFFA ANDIKA FIRZATULLAH

21323142

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PERJANJIAN ABRAHAM ACCORDS 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

LALU DAFFA ANDIKA FIRZATULLAH

21323142

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PERJANJIAN ABRAHAM ACCORDS 2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Daffa Andika Firzatullah
Tempat dan Tanggal Lahir : Mataram, 03 Februari 2003
Alamat : Jalan Asakota No.10 Taman seruni Ampenan
NIM : 21323142
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 November 2025



Lalu Daffa Andika Firzatullah

DAFTAR ISI

ANALISIS AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERJANJIAN ABRAHAM ACCORDS 2020	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	1
BAB 1	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB 2	20
PENGARUH POLITIK DOMESTIK DALAM KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM ABRAHAM ACCORDS 2020	20
2.1 Bureaucratic Influencer	20
2.2 Partisan Influencer	25
2.3 Interest Influencer	30
2.4 Mass Influencer	33
BAB 3	41
KONDISI EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS INTERNASIONAL DALAM KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MENJADI MEDIATOR DALAM ABRAHAM ACCORDS 2020	41
3.1 Kondisi Ekonomi dan Militer	41
3.1.1 Kapasitas Barang dan Jasa Serta Ketergantungan Pada Perdagangan dan Finansial Internasional	41
3.1.2 Dimensi Kemampuan Militer: Kapasitas dalam Penggunaan Kekuatan Militer	47

3.2 Konteks Internasional Amerika Serikat dalam Abraham Accords	54
3.2.1 Geografis	54
3.2.2 Ekonomi	56
3.2.3 Politis	57
BAB 4	59
PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas analisis Amerika Serikat sebagai mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020, dan memiliki fokus penelitian pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa periode pertama pemerintahan Donald Trump. Menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teori William D Coplin pengambilan keputusan atau *Policy Influencer*, penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan dengan beberapa determinan mulai dari aktor domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi aktor domestik, seperti Presiden Donald Trump, Jared Kushner, Mike Pompeo, Departemen luar negeri Amerika Serikat, Partai Republik, AIPAC, dan media massa mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai mediator dalam Abraham Accords dan beberapa bertindak sebagai aktor pengambilan keputusan. Dari segi kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional, produksi barang jasa, dimensi kemampuan militer, serta aspek geografis, ekonomi, dan politis, dapat mempengaruhi Amerika Serikat dalam mengambil sebuah pengambilan keputusan.

Kata-kata kunci: Kebijakan Luar Negeri, Pengambilan Keputusan, Mediator, Aktor Domestik, Kondisi Ekonomi Militer, Konteks Internasional

ABSTRACT

This research discusses the analysis of the United States as a mediator in the 2020 Abraham Accords, with a research focus on the foreign policy decision-making process during the first term of Donald Trump's administration. Using a qualitative research method and William D. Coplin's Policy Influencer theory, this study aims to examine the decision-making process through several determinants, including domestic actors, economic and military conditions, and the international context. The results of this research show that, from the domestic perspective, President Donald Trump, Jared Kushner, Mike Pompeo, the U.S. Department of State, the Republican Party, AIPAC, and mass media influenced the United States' foreign policy decision-making as mediator in the Abraham Accords, with several of them acting as key decision-making actors. In terms of economic and military conditions as well as the international context, factors such as the production of goods and services, dimensions of military capability, and geographical, economic, and political aspects contributed to shaping the United States' policy decision.

Keywords: Foreign Policy, Decision Making, Mediator, Domestic Actors, Economic and Military Conditions, International Context.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu alasan ketika dua negara atau lebih menjalin kerjasama, yaitu melihat peluang-peluang kepentingan negaranya dapat dipenuhi, baik itu kerjasama antar negara yang akan menguntungkan segi ekonomi, politis, militer, dan masih banyak lagi, hal itu tentunya dilakukan untuk mendapat kepentingan nasional dari sebuah negara. Timur Tengah selalu menjadi wilayah strategis dan dijadikan prioritas oleh Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, banyak isu global yang melibatkan Timur Tengah dan Amerika Serikat turut hadir dalam isu tersebut. Dapat dilihat dengan banyaknya andil Amerika Serikat dalam isu konflik Israel-Palestina, dan isu minyak di Timur Tengah. Sejak berakhirnya perang dunia II dan beberapa negara menjadi pemenang termasuk Amerika Serikat di dalamnya, Amerika Serikat menjadi negara *super power* yang banyak memiliki andil dalam isu-isu global termasuk beberapa isu di Timur Tengah, terlebih lagi secara *historical* Amerika Serikat memang sudah memiliki hubungan dengan negara Timur Tengah, yaitu Mesir dengan KTT Camp David nya dan Uni Emirat Arab yang memiliki hubungan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat (Michael Elias Shamma, 2019).

Perjanjian Abraham Accords 2021 adalah sebuah kesepakatan perdamaian yang di inisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat 2017-2021 Donald Trump untuk melakukan sebuah hubungan normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab

awalnya, namun seiring berjalannya waktu beberapa negara juga turut andil. Perjanjian ini dihadiri dan ditandatangani oleh perwakilan beberapa negara seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah Bin Zayed, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif Bin Rasyid, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terletak di Gedung putih Washington DC. Sebelumnya beberapa negara Arab terlebih dahulu menandatangani sebuah perjanjian normalisasi dengan Israel yaitu Mesir, Mesir menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel yaitu Perjanjian Camp David 1978, perjanjian ini ditandatangani di Gedung Putih Amerika Serikat pada 17 September 1978, ditandatangani oleh Presiden Mesir pada kala itu Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel pada kala itu Menachem Begin, perjanjian ini merupakan kesepakatan untuk menciptakan perdamaian di Kawasan Timur Tengah. Setelah Mesir yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, Yordania pun ikut dalam membuka hubungan diplomatik dengan Yordania setelah keterlibatan Yordania dalam perang enam hari atau *Six Day War* antara Israel dengan Mesir, Yordania, Suriah, dan kemudian Yordania menyepakati perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1994 (Anna Zakiah Derajat, 2022).

Dalam Abraham Accords sendiri, bahkan sebelum terinisiasinya perjanjian Abraham Accords 2020, Amerika memiliki posisi yang terbilang cukup penting dan signifikan. Dapat dilihat sebelumnya Amerika Serikat mengadakan sebuah konferensi yang disebut konferensi Warsawa di Polandia, yang dimana dalam pertemuan ini memiliki pembahasan utama yaitu terciptanya sebuah perdamaian di Kawasan Timur Tengah di masa depan, dan dalam pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara Arab dan Israel (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland,

2019). Dalam sejarahnya pula, adanya sebuah perjalanan panjang dalam Abraham Accords dari awal mulanya hingga keterlibatan pertama kali Amerika Serikat , yang dimana 15 tahun sebelum peresmian Abraham Accords, adanya sebuah hubungan tertutup antara negara-negara *Gulf Cooperation Council* dan juga Uni Emirat Arab dan Israel, adanya sebuah perubahan haluan kebijakan domestik Uni Emirat Arab dengan Israel yang dimana memungkinkan negara-negara ini melakukan hubungan politik dan kerjasama, bahkan setelah kejadian Arab Spring, fokusnya pula merambat pada penekanan pengaruh Iran di kawasan Teluk.

Amerika Serikat pula memiliki fokus yang sama, dimana pada tahun 2018 naiknya eskalasi politik antara Iran dan Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat melalui Donald Trump memberikan sanksi pada Iran, dan adanya ketegangan dimana Iran menembak Drone Militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, namun pada kala itu ada pula perubahan kebijakan Amerika Serikat, maka dari itulah perlunya sebuah wadah fokus utama untuk menangani masalah tersebut, maka pejabat politik Israel, Uni Emirat Arab dan aktor politik Amerika untuk Timur Tengah Jared Kushner ingin adanya sebuah terobosan yaitu adanya sebuah wadah internasional untuk normalisasi (Sanam Vakil, Neil Quilliam 2023). Inilah yang menjadi sebuah awal momentum secara pasti dan terbuka Amerika Serikat pada masa periode pertama Donald Trump memberitakan bahwa Abraham Accords akan menjadi sebuah perjanjian normalisasi Israel dengan negara-negara Timur Tengah.

Dalam kanal resmi pemerintah Amerika Serikat, Amerika Serikat memberikan *statement* terkait deklarasi perjanjian Abraham Accords. Amerika Serikat berpendapat bahwa pentingnya menjadi penjaga dan juga mengupayakan

adanya sebuah perdamaian di kawasan Timur Tengah, juga pentingnya mengedepankan adanya sebuah dialog agama dan budaya dalam memajukan sebuah perdamaian antar tiga agama abrahamik yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Dalam Abraham Accords Amerika Serikat berpendapat bahwa dalam menghadapi tantangan atau konflik global yaitu membutuhkan kerjasama serta dialog antar agama dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah maupun perdamaian secara global, dengan visi yaitu mewujudkan toleransi dan rasa hormat.

Dalam deklarasi itu pula Amerika Serikat mengharapkan adanya sebuah hubungan diplomatik antara negara Israel dengan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya dengan prinsip dan kesepakatan dalam perjanjian Abraham Accords (Trump White House, 2020). Amerika Serikat dengan dalih menjadi jembatan antara negara Israel dengan negara kawasan Timur Tengah lainnya untuk membuka hubungan diplomatik ini, secara eksplisit juga ingin membuka kerjasama dalam ruang lingkup sains dan perdagangan, dan hal ini juga termuat dalam deklarasi Abraham Accords Amerika Serikat.

Salah satu langkah dari membuka hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel adalah dengan cara melakukan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel, dengan keterlibatan Uni Emirat Arab menandatangani Perjanjian Abraham Accords. Perjanjian Abraham Accords ditandatangani oleh Israel, Uni Emirat Arab, dan diikuti dengan beberapa negara lainnya yaitu, Bahrain, Maroko, dan Sudan pada Agustus 2020, di Washington Amerika Serikat. Dengan ditandatangani perjanjian Abraham Accords diharapkan meningkatnya diplomasi dalam bidang regional dalam ruang lingkup budaya, ekonomi,

keamanan, dan politik serta Amerika Serikat diharapkan menjadi mediator antara negara Timur Tengah dan Israel.

Bahkan status Uni Emirat Arab yang tergolong negara yang maju, ada beberapa faktor pendorong ingin turut serta dalam Abraham Accords ini, yaitu kerjasama ekonomi bidang teknologi contohnya, Uni Emirat Arab, ingin sebuah kerjasama ekonomi dengan Israel khususnya di bidang investasi perusahaan dengan Israel, perusahaan-perusahaan Israel dan Uni Emirat Arab bahkan beberapa sudah ada yang menjalin kerjasama, dari situlah dengan adanya Abraham Accords ini dan Amerika Serikat ikut di dalamnya, semakin membuat beberapa negara gencar melakukan kerjasama (Anna Zakiah Derajat, 2022).

Memang bahwasanya yang menjadi sebuah perdebatan yaitu negara-negara Timur Tengah yang menandatangani Abraham Accords, yang menjadi sorotan karena akan berbenturan dengan isu konflik Israel dan Palestina, namun yang tak kalah menarik pula, ada dua negara di luar kawasan Timur Tengah seperti Sudan dan Maroko, ikut serta dalam Abraham Accords.

Ada beberapa deklarasi dari Abraham Accords itu sendiri, namun pada awal deklarasi nya, isi dari Perjanjian Abraham Accords 2020 meliputi beberapa poin yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama ekonomi, dan mencakup normalisasi diplomasi ekonomi dan keamanan,
2. Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko meningkatkan agenda strategis ekonomi kawasan,
3. Israel akan menunda sementara ekspansi wilayah Palestina, dan lebih memfokuskan agenda normalisasi dalam perjanjian Abraham

Accords.

Dengan melihat keterlibatan Amerika Serikat yang cukup aktif dalam di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat memainkan sebuah peranan penting dalam menginisiasikan beberapa kali forum global melibatkan negara-negara Timur Tengah. Selain itu, dapat dilihat pula Amerika Serikat tidak segan dalam membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab khususnya pada perjanjian Abraham Accords, dengan dalih membangun hubungan diplomatik, dan dengan dalih untuk menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah (Trump White House 2020).

Namun tak sedikit mengatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam Abraham Accords ini merupakan sebuah proses mediasi yang Amerika Serikat fokus pada bagaimana proses kebijakan ini akan menguntungkannya Amerika Serikat itu sendiri, dalam penjelasan sebelumnya bahwa normalisasi ini dalam konteks domestik Amerika Serikat muncul dari pengamanan geopolitik, dan yang paling signifikan yaitu dari hal ekonomi. Dalam deklarasinya pula banyak menyinggung kerjasama-kerjasama antar negara, dan dapat dilihat dari adanya deklarasi ini banyaknya kerjasama-kerjasama di berbagai sektor tercipta seperti teknologi, sains, dan Amerika Serikat terlibat dalam kerjasama tersebut (Anna L Jacobs 2021). Dalam hal segi militer pun yang pada akhirnya akan menjadi sebuah pendorong ekonomi pula, Amerika Serikat dalam sektor militer menjadi negara yang mempromosikan, dan membantu mendistribusikan senjata di kawasan teluk khususnya pada negara yang ikut dalam Abraham accords ini (Congressional Research Service United States 2020). Berangkat dari hal tersebut lah yang menjadi beberapa dasar mendorong Amerika Serikat terlibat dalam

mediator di Abraham Accords 2020, yaitu kepentingan ekonomi dan geopolitik, analisis terkait hal ini akan penulis jabarkan dalam poin pembahasan kondisi ekonomi dan militer.

Namun demikian tentunya Amerika Serikat memiliki kepentingan nasionalnya sendiri dalam menerapkan kebijakan luar negerinya dengan negara Timur Tengah. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis memfokuskan tujuan amerika dalam menjadi mediator pada tahun 2020 di perjanjian Abraham Accords, dan proses dari Amerika mengambil kebijakan luar negerinya terhadap perjanjian Abraham Accords 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat sebagai mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan Amerika Serikat sebagai mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020.
2. Untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam Abraham Accords 2020.

1.4 Cakupan Penelitian

Israel di kawasan Timur tengah tidak memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya, Israel yang memiliki konflik dengan Palestina secara tidak langsung mengancam Kawasan regional

negara-negara Timur Tengah lainnya. Inisiasi hubungan diplomatik Israel dan Uni Emirat Arab terjalin dan menjadi latar belakang terciptanya Abraham Accords 2020, Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada rentan waktu dimulai pada tahun 2018 di masa periode pertama Pemerintahan Presiden Donald Trump disaat Amerika Serikat menginisiasikan untuk menjadi mediator antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan negara Kawasan Timur Tengah lainnya, dalam menjadi mediator Amerika Serikat tentunya demi mencapai kepentingan nasionalnya dengan menerapkan kebijakan luar negerinya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingan nasionalnya di Perjanjian Abraham Accords. Maka dari itu penulis mengambil 3 literatur bacaan terkait fokus pembahasan keterlibatan Amerika Serikat dalam Abraham Accords baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai aspek, agar penulis mendapat sebuah keterbaharuan dalam melakukan penelitian. Terdapat tiga literatur yang dijadikan sebagai landasan penganalisaan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Dalam jurnal yang berjudul Sumber kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Balik Penandatanganan Abraham Accords yang ditulis oleh Arvy Chrisando Lantang, dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada Abraham Accords mengambil proses kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Holsti yaitu *Economic Rewards* dan *Diplomatic Bargaining*, yang dimana Amerika Serikat melakukan proses negosiasi dengan negara-negara yang ingin menandatangani Abraham Accords,

dapat dilihat dengan proses negosiasi Amerika Serikat dengan Uni Emirat Arab.

Amerika Serikat dengan dengan penasehat utama negaranya yaitu Kushner bernegosiasi dengan Uni Emirat Arab secara terpisah dengan negara Israel yang dimana terbukanya sebuah opsi penghentian aneksasi, dan opsi tersebut langsung dimanfaatkan oleh Kushner untuk menjadi salah satu poin Amerika Serikat menguatkan posisinya sebagai inisiatif menjadi mediator di perjanjian Abraham Accords. Dalam poin *Economic Rewards*, Amerika Serikat berdiplomasi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, dapat dilihat dengan Amerika Serikat memberikan 400,000 Ton gandum kepada Negara Sudan sebagai simbol bantuan kemanusiaan (Arvy Chrisando Lantang, 2023).

Penulis menemukan sebuah jurnal yang berjudul Dampak Dari Abraham Accord bagi Palestina dan pandangan negara Islam Timur Tengah Mengenai perjanjian Abraham Accords, yang ditulis oleh LM Rezky Rafi Athallah Rahim, pada tahun 2023. Dalam jurnal yang ditulis ini, para penulis membahas mengenai perjanjian Abraham Accords yang merupakan sebuah kesepakatan dan pengakuan dari Negara Israel dengan negara-negara yang menandatangani perjanjian ini sebagai salah satu cara memperkuat perdamaian di Timur Tengah, menurut Sekretariat Negara Amerika Serikat Antony Blinken perjanjian Abraham Accords dapat menjawab permasalahan yang memerlukan sebuah kerjasama antar negara dan dapat mengurangi ketegangan regional, serta adanya perjanjian ini dapat menjadi sebuah normalisasi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan di Palestina. Dalam jurnal para penulis juga menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara termasuk Amerika Serikat yang mengatakan bahwa perjanjian ini dapat menjawab ketegangan regional masih dianggap sebagai hal

skeptis. Pandangan negara islam dalam perjanjian ini menilai kesepakatan ini akan memudahkan penjajah dan tentunya akan menjadi sebuah ancaman bagi perjuangan yang telah dilakukan Palestina, Palestinian Authority berasumsi bahwa normalisasi ini akan membuat Israel mendapat citra sebagai negara yang mengedepankan kebebasan beragama, dan dapat memperkuat Israel untuk bisa menguasai tempat suci (LM Rezky Rafi Athallah Rahim 2023).

Dalam jurnal berikutnya, yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Presiden Trump Terhadap Timur Tengah (2016-2021) Sebuah Analisis Kritis yang ditulis oleh Mansoor Ahmed, Mohammad Ozair dan Irfan Khan yang ditulis pada tahun 2021. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa kesepakatan Abraham Accords ditengahi langsung oleh Donald Trump dan Jushed Kuser, dalam kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab akan mencapai adanya sebuah resolusi yang komprehensif dan adil untuk menyelesaikan konflik kemasyarakatan Palestina dan Israel. Presiden Donald Trump ingin meninggalkan sebuah warisan strategis dan membentuk mitra strategis, kesepakatan Abraham Accords ini pula menjadi sebuah perubahan keseimbangan kekuatan di Kawasan Timur Tengah (Mansoor Ahmed, 2021).

Dengan demikian, keterbaruan dari penelitian penulis ini adalah analisis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadi mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020, dan kepentingan nasional apa yang akan didapatkan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Amerika Serikat dalam perjanjian Abraham Accords 2020 sebagai mediator, melihat bahwa Amerika Serikat bukan negara dari kawasan Timur Tengah, tetapi turut serta dalam normalisasi hubungan negara

kawasan Timur Tengah dengan Israel dalam Abraham Accords 2020.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mengenai Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat Sebagai Mediator Dalam Perjanjian Abraham Accords 2020 ini menggunakan Teori Pengambilan Keputusan oleh *William D Coplin*, yang nantinya akan diimplementasikan oleh aktor politik bisa disebut juga *Policy Influencer*. Dalam teori pengambilan keputusan ini, William D. Coplin berpendapat bahwa politik dalam negeri akan memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan terhadap politik luar negeri, dan dalam proses pengambilan keputusan ini, tentunya diperlukan sebuah kerangka konseptual yang memiliki sebuah konsep-konsep yang sama namun memiliki sebuah gejala-gejala yang berbeda, mengingat bahwa kondisi politik setiap negara memiliki dinamika yang berbeda-beda. Kerangka konseptual politik luar negeri dengan aktor politik yang dimana aktor politik dapat disebut sebagai *Policy Influencer* atau yang dapat diartikan sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi kebijakan, menurut William D Coplin sendiri, *Policy Influencer* yang hakikatnya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan memiliki beberapa proses dalam sebuah pengambilan keputusan, Adapun aspek-aspek dalam *Policy Influencer* yaitu:

1. Politik Domestik:

a. *Bureaucratic Influencer*

Menurut *William D Coplin*, *Bureaucratic Influencer* atau birokrat yang dapat mempengaruhi merupakan sebuah aspek dalam *Policy Influencer* yang mana menjelaskan bahwa individu dan organisasi

pemerintah dapat membantu para pengambil keputusan dalam memberikan pandangan, dan menyusun dalam membentuk sebuah kebijakan atau bahkan mengimplementasikan kebijakan luar negeri tersebut. Aspek birokrat yang dapat mempengaruhi ini juga terkadang bagian dari pengambil keputusan tersebut, dan inilah yang menjadikan *Bureaucratic Influencer* menjadi salah satu instrumen yang memiliki pengaruh kuat dalam sebuah pengambilan keputusan. Peranan *Bureaucratic Influencer* dalam perumusan kebijakan luar negeri sangat berpengaruh dikarenakan biasanya kelompok ini merupakan salah satu penyalur informasi untuk mendukung dalam melaksanakan sebuah pengambilan keputusan

b. *Partisan Influencer*

Menurut *William D Coplin*, *Partisan Influencer* adalah sebuah *Influencer* yang menerjemahkan tuntutan-tuntutan yang nantinya akan ditafsirkan menjadi sebuah tuntutan politis menyangkut kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah atau para pengambil keputusan. *Partisan Influencer* menyediakan anggota-anggota yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, aspek ini pula dapat untuk mempengaruhi sebuah kebijakan secara besar ketika para pengambil keputusan belum resmi menentukan sebuah kebijakan, akan tetapi ketika pengambil keputusan sudah mengambil keputusan aspek *Partisan Influencer* ini akan dibatasi.

c. *Interest Influencer*

Menurut *William D Coplin*, *Interest Influencer* adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan atau tujuan sama yang menggunakan berbagai cara politik untuk mempengaruhi sebuah kebijakan-kebijakan. *Interest Influencer* ini pula bukan hanya dapat mempengaruhi kebijakan atau para pengambil keputusan, tetapi juga dapat mempengaruhi atau menyelaraskan kepentingan dengan aspek-aspek yang lainnya, seperti dukungan ekonomi, dan memang aspek ini cenderung bergerak ekonomi. *Interest Influencer* menggunakan beberapa cara, seperti melakukan kampanye dengan mengirimkan surat, membantu dengan memberikan dana finansial, atau bahkan menekan untuk menarik dukungan.

d. *Mass Influencer*

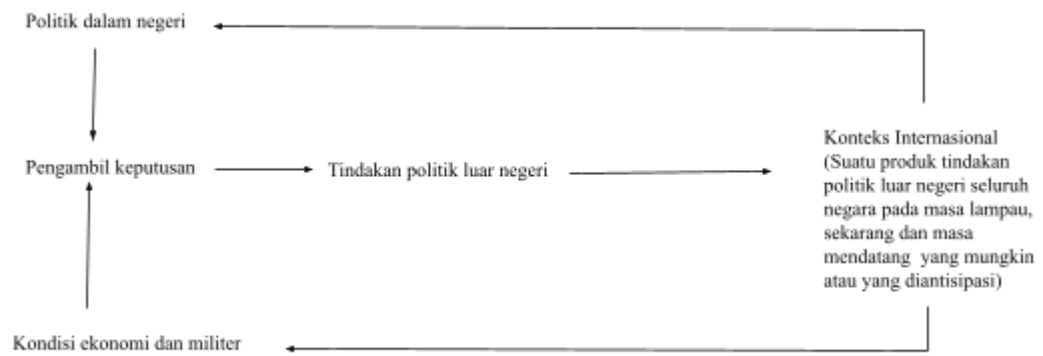
Menurut *William D Coplin*, *Mass Influencer* adalah sebuah aspek yang mana opini publik dapat mempengaruhi sebuah kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan, para pengambil keputusan pula menggunakan media massa atau media komunikasi dalam membuat sebuah siklus opini yang mendukung sebuah pengambilan kebijakan tersebut, dan pengambil keputusan melihat bagaimana respon massa atau masyarakat dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pembuat keputusan, serta mengambil masukan-masukan dari *Mass Influencer* juga.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Menurut William D Coplin, untuk dapat memahami sebuah kebijakan dalam sebuah negara, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer merupakan sebuah nilai yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan sebuah kebijakan luar negeri sebuah negara. Para aktor pengambil keputusan harus dapat benar-benar membuat keseimbangan antara kemampuan negara dan keterbatasan negara dengan menggunakan nilai-nilai dari kondisi militer dan ekonomi, maka dari itu Coplin menganggap nilai-nilai dari tersebut memainkan sebuah peranan penting dalam sebuah politik luar negeri. Kemajuan ekonomi sebuah negara dapat untuk melakukan sebuah ekspansi yang lebih matang untuk melakukan sebuah hegemoni, meskipun negara-negara yang memiliki kemajuan ekonomi tidak terlibat secara langsung dalam ekspansi tersebut (William D Coplin 2003, 172).

3. Konteks Internasional

Menurut William D Coplin, konteks internasional menekankan kepada sifat sistem internasional sendiri pada hubungan antar negara-negara dalam menentukan bagaimana sebuah negara akan berperilaku, perilaku negara-negara tersebut dapat didasarkan dengan melihat geografisnya, dengan asumsi bahwa negara-negara akan memperluas wilayah-wilayahnya dalam menjalin hubungan dalam konteks internasional. Ada tiga elemen penting dalam pembahasan konteks internasional terhadap sebuah politik luar negeri, yaitu geografis, ekonomi dan politis (William D Coplin 2003, 165).



Sumber : *William D. Coplin*” (2003/30)

“empat determinan dapat mempengaruhi tindakan dalam politik luar negeri”

1.7 Argumen Sementara

Dengan teori dari William D Coplin pengambilan keputusan atau *Policy Influencer* mencakup *Bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer*, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional, maka penulis beranggapan bahwa :

1. *Bureaucratic Influencer*

National Security Council yang merupakan sebuah lembaga dalam Pemerintah Amerika Serikat yang bertugas membantu merumuskan, koordinasi, dan memberi nasihat Presiden, tentunya terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan Amerika dalam menjadi mediator di Abraham Accords.

2. *Partisan Influencer*

Partai Republik sebagai pemenang pemilu pada masa kepemimpinan pertama Donald Trump, pastinya memiliki anggota-anggotanya dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam menjadi mediator di Abraham Accords.

3. *Interest Influencer*

Kelompok lobi Amerika Serikat memiliki sebuah peranan dalam melakukan lobi-lobi dan bantuan ekonomi pada kongres Amerika Serikat terkait kebijakan Abraham Accords itu sendiri, baik terkait bantuan pada anggota kongres, maupun pada kebijakan.

4. *Mass Influencer*

Media massa melakukan tugasnya dengan sebuah tujuan dalam upaya dalam media membuat opini mempengaruhi masyarakat dalam membuktikan bahwa pemerintahan Donald Trump pada kala itu membuat sebuah kebijakan yang tepat.

5. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer Amerika Serikat memberikan mereka kemampuan untuk melakukan ekspansi lebih jauh dalam implementasi proses kebijakan sebagai mediator pada Abraham Accords.

6. Konteks Internasional

Amerika Serikat sebagai negara *super power* memiliki sebuah kekuatan untuk mengkonsolidasikan negara-negara dalam Abraham Accords untuk mengikuti keputusannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau dengan cara analisis deskriptif, penulis menilai metode penelitian kualitatif akan efektif karena dapat membahas secara komprehensif menggunakan literatur yang relevan dan kredibel.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan Amerika Serikat di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap Perjanjian Abraham Accords 2020. Objek dalam penelitian ini yaitu Amerika Serikat yang berperan sebagai mediator dan proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam Perjanjian Abraham Accords 2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan literatur seperti jurnal, buku, laporan resmi oleh organisasi atau pemerintah, dan situs resmi kanal berita terkait isu yang akan diteliti oleh penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis akan memulai penelitian dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan isu yang akan diteliti, kemudian akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, dan akan mengkorelasikan subjek dan objek yang telah didapatkan oleh penulis, yang kemudian akan diteliti dengan data yang dapat dipastikan kredibilitas dan validitasnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

Bab 2 merupakan pembahasan terkait proses penganalisaan dan identifikasi data-data serta informasi terkait tujuan Amerika Serikat sebagai

mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020 dengan melihat peranan aktor-aktor seperti *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer* dan *Mass Influencer*.

Bab 3 merupakan pembahasan terkait proses penganalisaan dan identifikasi data-data serta informasi terkait tujuan Amerika Serikat sebagai mediator dalam perjanjian Abraham Accords 2020 melalui aspek ekonomi, militer dan konteks internasional.

Bab 4 merupakan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas pada masing-masing bab oleh penulis.

BAB 2

PENGARUH POLITIK DOMESTIK DALAM KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM ABRAHAM ACCORDS 2020

Dalam pembahasan bab II ini, penulis akan membahas terkait bagaimana sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki beberapa determinan yang dapat mendorong atau membantu sebuah kebijakan, singkatnya ada beberapa aktor politik atau beberapa ruang lingkup yang dapat terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri, mulai dari aktor politik atau ruang lingkup dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri.

2.1 *Bureaucratic Influencer*

Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, Amerika Serikat cenderung tertutup dalam menjalankan proses mediasinya, namun ada beberapa cara Amerika Serikat melakukan mediasinya dalam Abraham Accords itu sendiri, yaitu langsung mengadakan pertemuan dengan negara-negara yang terlibat dalam Abraham Accord, dan juga Menggunakan *Diplomacy Shuttle*. *Diplomacy Shuttle* sendiri merupakan sebuah diplomasi dimana pihak ketiga atau mediator dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau permasalahan, tidak mempertemukan secara langsung pihak yang bersengketa, namun mediator yang berpindah-pindah melakukan diplomasi bilateral (Piero Gottardi and Claudio Mezzetti 2023, 3).

Dalam pembahasan *Bureaucratic Influencer* ini, penulis akan membahas terkait bagaimana proses mediasi Amerika Serikat dan bagaimana Amerika Serikat menggunakan *Diplomacy Shuttle* tersebut, dan bagaimana sebuah

kebijakan luar negeri memiliki beberapa determinan yang dapat mendorong sebuah kebijakan, atau singkatnya ada beberapa aktor politik atau beberapa ruang lingkup yang dapat terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri memiliki sebuah sifat umum, yaitu adanya sebuah pernyataan-pernyataan dalam pengambilan kebijakannya, sehingga kebijakan yang melalui pernyataan-pernyataan tersebut membuat sebuah pola struktur birokrasi dan hierarki tersendiri (William D Coplin 2003, 33). Dalam *Bureaucratic Influencer* sendiri, aktor pengambilan keputusan yang digunakan yaitu aktor eksekutif, karena aktor eksekutif condong dapat melakukan perumusan kebijakan sekaligus langsung dapat menjadi sebuah eksekutor itu sendiri, dan memang *influencer* yang berasal langsung dalam pemerintahan itu sendiri.

Presiden Donald Trump, Jared Kushner, Mike Pompeo dan Departemen luar negeri Amerika Serikat yang dimana memiliki tugas, pokok dan fungsi utamanya menangani terkait perumusan kebijakan dan eksekusi langsung sebagai aktor pengambilan keputusan, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam ranah hubungan serta kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu melalui perundingan secara langsung dengan negara yang terlibat dalam Abraham Accords, sebelum adanya deklarasi Abraham Accords, Israel akan melakukan aneksasi wilayah tepi barat Palestina, namun Uni Emirat Arab menganggap hal itu akan memunculkan ketengangan politik, maka Duta Besar Uni Emirat Arab menyampaikan hal tersebut kepada Amerika Serikat, bahwa Uni Emirat Arab akan setuju secara resmi terlibat dalam normalisasi dengan Israel jika menunda melakukan aneksasi tersebut, maka dari itu Amerika Serikat melakukan

konferensi tiga arah bersama Donald Trump, Perdana Menteri Israel Netanyahu, dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed (Middle East Institute 2025). Amerika Serikat pula dengan Jared Kushner mengunjungi Uni Emirat Arab, yang dimana melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, dan delegasi Israel, membahas terkait kerjasama perdagangan, ekonomi, dan budaya serta mendesak Palestina untuk membuka komunikasi dengan Israel sebagai mitra, disisi lain Pemerintahan Trump terus mendesak negara Arab untuk turut serta, agar dapat terus menekan pengaruh Iran (Dan William and Lisa Barrington 2020).

Salah satu langkah kebijakan Amerika Serikat untuk turut andil dalam Abraham Accords ini melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu melakukan kunjungan ke beberapa negara-negara yang memiliki probabilitas untuk turut serta dalam perjanjian ini. Dapat dilihat pada Agustus tahun 2020 Amerika Serikat yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo berkunjung ke Sudan, yang dimana pada kunjungan itu membahas tentang dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah transisi Sudan dan Amerika Serikat menekankan hubungan lebih dalam antara Sudan dan Israel, pembahasan dalam kunjungan Amerika Serikat untuk menekankan hubungan Israel dan Sudan tentunya dilakukan Amerika Serikat untuk menarik masuk Sudan turut andil menandatangani perjanjian Abraham Accords, melihat Sudan yang dahulu merupakan negara yang tidak menjadi menjalin hubungan diplomatis dengan Israel, bahkan Sudan merupakan negara yang sebelumnya mendukung Palestina, dan melihat Sudan sebagai negara rentan, tertinggal (Middle East Institute 2025). Begitu pula dengan Maroko, Departemen Luar Negeri Amerika

Serikat saat mengunjungi Maroko, yang dimana Amerika Serikat mengakui Wilayah Sahara Barat, dan beberapa intensif yang lainnya seperti kerjasama militer, yang dimana pengakuan wilayah tersebut merupakan kontrak politik yang dimana Maroko ikut dalam Abraham Accords dan Amerika Serikat mengakui wilayah Sahara Barat (Middle East Institute 2025).

Beberapa dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Amerika Serikat tidak semerta merta di dapat dengan percuma oleh Sudan, ada beberapa hal yang menjadi timbal balik Sudan kepada Amerika Serikat, salah satunya seperti Sudan memberikan sebuah kompensasi sebesar 335 juta Dollar dari tragedi pengeboman kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 (Al Jazeera 2021). Pada kala itu tentunya Sudan masih dalam daftar Amerika Serikat sebagai negara sponsor teroris, penulis juga menilai dengan dicabutnya Sudan sebagai negara sponsor terorisme oleh Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat sebagai mitra anti teroris Amerika Serikat dan menambah sekutu Amerika Serikat di kawasan Afrika.

Skema kebijakan luar negeri yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat pada kunjungan-kunjungannya di beberapa negara yang akan berpotensi menandatangani perjanjian Abraham Accords 2020 yaitu *Aid Diplomacy*, diplomasi aid sendiri adalah sebuah skema kebijakan luar negeri yang dimana sebuah negara memberikan sebuah bantuan baik berupa barang, jasa, teknologi ekonomi, militer atau bahkan dukungan, *Aid Diplomacy* ini sendiri sering juga disebut sebagai diplomasi timbal balik (Rachel Augustine Potter 2015, 7).

Kunjungan-kunjungan Internasional Amerika Serikat dalam upaya mengajak negara-negara untuk menandatangani perjanjian Abraham Accords

tidak hanya ke negara Sudan, Amerika Serikat pun menandatangani Uni Emirat Arab, melalui Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo pada kala itu. Dalam pertemuannya, Mike Pompeo bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed, membahas terkait hubungan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel, dukungan gencatan senjata di Libya, dan dukungan Amerika Serikat pada persatuan teluk dan melawan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah (U.S Department of State 2021).

Dalam kunjungan internasional tersebut pula negara Bahrain ikut menjadi destinasi kunjungan internasional Amerika Serikat, skema kebijakan yang sama pun diterapkan oleh Amerika Serikat, pembahasan tentang normalisasi hubungan dengan Israel dan juga dukungan Amerika Serikat pada persatuan teluk, dapat dilihat dengan Amerika Serikat memiliki sebuah pangkalan militer di Bahrain, yang dimana tentunya hal itu untuk membantu Bahrain dalam penguatan militer di kawasan teluk (U.S Department Of State 2020).

Aktor Politik individu yang dijabarkan penulis tadi memainkan peranan sentral negara Abraham Accords, melihat posisi Amerika Serikat sebagai mediator dalam membentuk sebuah inisiasi pertemuan mediasi dengan beberapa negara Abraham Accords dalam menyepakati beberapa hal dan menyelesaikan beberapa permasalahan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memiliki sebuah peranan sentral dalam proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam Abraham Accords, menjadi fasilitator, aktor negosiasi, pengambilan kebijakan secara insentif juga dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri, dalam hal ini pula penulis melihat bahwa Mike Pompeo yang pada kala itu menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menjadikan

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai aktor mediator utama, selain memerankan sebuah peranan sentral dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya.

2.2 *Partisan Influencer*

Partisan Influencer dalam menekan sebuah kebijakan dengan menempatkan aktor-aktornya atau anggotanya yang dapat berperan sebagai aktor pengambilan keputusan, dan tidak memiliki legitimasi hukum untuk terlibat dalam politik terbuka, seperti terjun langsung dalam pemerintahan,. *Influencer* ini cenderung mempengaruhi politik dalam negeri dan menurut William D Coplin *partisan Influencer ini* memiliki langkah gerak yang sempit atau tidak fleksibel dalam sebuah konsep pengambilan keputusan (William D Coplin 2003, 84).

Dalam hal ini kita dapat melihat Partai Republik Amerika Serikat sebagai salah satu *Partisan Influencer* dalam konteks tujuan Amerika Serikat sebagai mediator dalam Abraham Accords 2020, ketika mengacu pada penjelasan partai yang mempengaruhi dalam menaruh anggotanya di aktor-aktor pengambilan keputusan, dan mempengaruhi politik dalam negeri, pada hal ini cenderung mempengaruhi ranah legislatif. Partai Republik Amerika Serikat dalam upaya untuk ikut andil dalam Abraham Accords, memiliki anggota partai yang menempati jabatan struktural strategis di pemerintahan Amerika Serikat, seperti Donald Trump Presiden Amerika Serikat, Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kala itu, Jared Kushner sebagai penasehat senior Gedung Putih sekaligus pemilik dari Abraham accords institute of peace, David Friedman sebagai Duta besar Amerika Serikat di Israel sekaligus pendiri Friedman Center

for Peace through Strength lembaga yang mendukung perdamaian di Timur Tengah dan Abraham Accords, Aryeh Lightstone sebagai utusan khusus dalam Abraham Accords Business Summit, mereka merupakan orang yang memiliki pengaruh dalam Abraham Accords 2020 dan berasal dari Partai Republik.

Keterbatasan gerak Partai yang mempengaruhi ini dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri atau pengambil keputusan didasari atas landasan hukum, partai yang statusnya sebagai organisasi politik tidak memiliki wewenang dalam menjalankan tersebut, melainkan pemerintah lah yang memiliki wewenang tersebut, baik ranah legislatif, yang bisa dilakukan partai politik yaitu seperti memiliki anggota dalam pemerintahan untuk mempengaruhi dan juga membuat sebuah opini publik (William D .Coplin 2003, 87). Donald Trump yang mencalonkan sebagai calon Presiden pada tahun 2016 di Amerika Serikat didukung penuh oleh Partai Republik, hal ini dilakukan oleh para kongres anggota partai Republik di kongres Amerika Serikat yang dimana mereka mendukung penuh perjanjian Abraham Accords 2020.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Partai Republik melalui badan organisasi Republican National Committee partai, tentunya para anggota kongres yang berasal dari Partai Republik mendukung penuh langkah Amerika Serikat sebagai mediator, dapat dilihat dengan pernyataan-pernyataan para anggotanya, Senator Lankford mengatakan *“It was a great day for peace when I joined President Trump at the White House and leaders from Israel, Bahrain, and the United Arab Emirates more than a year ago as they signed the historic Abraham Accords”* (James Lankford 2022). Senator Rick Scott mengatakan *“I call upon Abraham Accords countries and the gulf council, including Saudi*

Arabia, to condemn this crime against Israel and to openly support people from Israel” (Rick Scott 2023). Donald Trump secara langsung pun mengatakan bahwa “ Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates’ lead. And I want to just thank them for being — it’s not surprising, knowing Mohammed so well. It’s not surprising. They are in that lead position. And normalize relations with Israel. We are already discussing this with other nations — with very powerful, very good nations and people that want to see peace in the Middle East. So you will probably see others of these, but this is the first one in more than 25 years” (Oval Office 2020).

Selain itu, partai Republik yang memiliki anggota di kongres Amerika Serikat, dalam upayanya menetapkan sebuah kebijakan untuk Abraham Accords tersebut, para anggota anggota kongres yang berasal dari Partai Republik mencoba untuk memperluas perjanjian Abraham Accords dan melakukan penguatan hubungan dengan Israel, yang dimana dalam menjelaskan bahwa dalam menambah utusan khusus untuk perluasan perjanjian Abraham Accords 2020 dapat menjadi sebuah catatan sejarah negara-negara dengan mayoritas muslim menormalisasi hubungan dengan Israel dan membuat sekutu dengan negara negara tetangga mayoritas muslim, hal ini tertuang dalam H.R 3099- *ENVOY FOR THE ABRAHAM ACCORDS ACT* (Mike Lawler 2023).

H.R 3099 ini sendiri merupakan sebuah undang-undang yang dimana berorientasi pada tanggung jawab Amerika Serikat sebagai mediator dalam Abraham Accords dan perlunya perluasan normalisasi Israel dengan negara-negara lainnya, Namun perlu dipahami walaupun pada kala itu kongres Amerika Serikat mayoritas berasal dari partai republik, namun masih ada

beberapa kursi di kongres yang diduduki oleh partai demokrat, hal inilah yang menyebabkan dinamika internal kongres dalam melihat perjanjian Abraham Accords, seperti pada penjelasan sebelumnya Amerika Serikat menyetujui undang-undang “*ENVOY FOR THE ABRAHAM ACCORDS*”, namun tidak semua kongres menyetujui undang-undang tersebut, beberapa anggota kongres dari partai demokrat menolak hal tersebut.

Perdebatan dalam kongres Amerika Serikat yaitu tujuan utama dari normalisasi Israel dengan negara lain dalam Abraham Accords, salah satu kepentingan Israel dalam hal ini yaitu jalur normalisasi tanpa hambatan, penulis melihat sebelum Abraham Accords adanya sebuah perjanjian Israel dengan beberapa negara seperti Mesir yaitu perjanjian Camp David yang dimana membahas tentang kerjasama Mesir dan Israel, serta perjanjian damai antara Mesir dan Israel, namun salah satu syaratnya adalah konsesi wilayah Israel, yang dimana Israel memberikan sebuah *Palestinian Autonomy*, atau otonomi daerah untuk Palestina namun otonomi terbatas (Harvey Sicherman 1990).

Namun pola yang berbeda dalam perjanjian Abraham Accords, yang dimana tidak ada penempatan point khusus dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, yang dimana dulu dalam normalisasi beberapa negara di timur tengah dengan Israel setidaknya ada pembahasan poin khusus terkait perdamaian di Palestina, namun tidak dengan Abraham Accords, dalam deklarasi resmi Abraham Accords, justru menekankan terkait perdamaian melalui cara kerjasama, dialog antar agama, mendukung ilmu pengetahuan, kedokteran, seni dan perdagangan lain (U.S Department of State). Maka dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam Abraham Accords, Israel memiliki kepentingan, dapat melakukan

atau menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, khususnya negara-negara yang dahulu pro- palestina, tanpa perlu untuk memberikan janji perdamaian atau konsesi wilayah ke palestina, disisi lain adanya pengesahan H.R 3099- *ENVOY FOR THE ABRAHAM ACCORDS ACT*, untuk membuat sebuah jabatan khusus dalam mempermudah jalannya perjanjian Abraham Accords ini.

Berangkat dari hal tersebut, beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat menentang perjanjian normalisasi ini, anggota kongres dari Partai Demokrat juga beranggapan bahwa undang-undang tersebut dan perjanjian normalisasi Israel merupakan hal yang mereka anggap skeptis dan terlalu utopis. Jamaal Bowman salah satu anggota kongres dari demokrat yang tidak setuju dengan undang-undang normalisasi dengan Israel berpendapat bahwa undang-undang yang menjadi legitimasi Amerika Serikat menjadi mediator dan mendukung normalisasi negara lain dengan Israel justru tidak adil dan hanya menguntungkan Israel, hal itu hanya akan mengekang Palestina, yang dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk resolusi damai tapi justru hanya kepentingan kerjasama antar negara saja (Ron Kampeas 2022).

Beberapa dinamika dalam pemerintahan Amerika Serikat bukan hanya kongres antara Partai Republik dan demokrat, yaitu kritik demokrat terhadap para anggota kongres yang didominasi oleh partai republik, yang dimana demokrat menganggap bahwa Abraham Accords sudah melenceng dari tujuannya, justru adanya penjualan senjata yang terjadi, dapat memicu kawasan otoriter di lingkup negara-negara yang mengikuti Abraham Accords, dan akan memicu perlombaan senjata, dari hal tersebut justru akan memantik Iran dalam meningkatkan kapasitas militernya pula dan menjadi ancaman yang lebih besar, bahkan narasi yang dibuat

oleh demokrat yaitu, ketika nanti anggota kongres di duduki oleh mayoritas demokrat, para legislator demokrat akan membatalkan undang-undang tersebut (Jay Solomon 2021). Namun melihat dari segi kuantitas, undang-undang tersebut tetap disahkan walaupun dalam perumusannya dan pengesahannya terjadi dinamika internal para anggota kongres karena memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa *Partisan Influencer* atau partai yang mempengaruhi yang dimana dijabarkan dalam hal tersebut yaitu Partai Republik, memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan dan membuat sebuah opini publik, dapat dilihat dengan bagaimana Donald Trump sebagai anggota Partai Republik dianggap sebagai tokoh utama dan kongres Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik ikut andil dalam ranah internal pemerintahan Amerika Serikat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait Abraham Accords ini.

2.3 *Interest Influencer*

Interest influencer atau kepentingan yang mempengaruhi merupakan skema *Policy Influencer* berikutnya, skema memang secara terminologi sama dengan *Partisan Influencer*, namun *Influencer* ini belum cukup kuat dan luas menjadi sebuah dasar sebagai aktivitas sebagai sebuah kelompok partai, dalam sistem politik tertutup *Interest Influencer* cenderung melakukan arah gerak yang tertutup terutama dalam sistem negara Presidensial seperti Amerika Serikat, namun dalam sistem politik terbuka *Interest Influencer* lebih leluasa, karena biasanya *Interest Influencer* condong bergerak pada ranah ekonomi dan *Interest*

Influencer biasanya memiliki sumber-sumber finansial, tak heran ada beberapa *Interest Influencer* yang dapat memberikan sumbangan ekonomi kepada negara maupun partai (William D Coplin 2003, 87).

Dalam hal ini, dapat dianalisis yaitu AIPAC (American Public Affairs Committee) yang di mana merupakan salah satu kelompok lobi terbesar di Amerika Serikat, AIPAC merupakan kelompok lobi yang dimana mendukung serta memperkuat hubungan dalam ruang lingkup ekonomi, militer, diplomatik dan mempengaruhi kebijakan luar negeri khususnya kebijakan luar negeri yang melibatkan Israel atau bisa disebut sebagai kelompok lobi pro-Israel (Agus Setiawan 2004).

Keterlibatan AIPAC meliputi lobi dari beberapa anggota kongres Amerika Serikat, ikut dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU, pembuatan opini publik dan narasi, serta keterlibatan signifikan yang lainnya, dalam keterlibatan AIPAC dalam RUU misalnya, AIPAC mensponsori salah satu RUU, namun dapat dipahami bahwa AIPAC tidak bisa ikut terlibat langsung dalam sistem hukum pemerintahan atau tidak bisa ikut andil secara penuh dalam sistem legislatif pemerintahan karena statusnya sebagai sebuah organisasi nirlaba atau *Social Welfare Organization*, namun disinilah peran dari sebuah kelompok lobi, cara dari AIPAC untuk bisa ikut langsung dalam sebuah sistem politik atau dalam konteks ini dalam ranah legislatif yaitu melobi anggota kongres atau mendukung sebuah kebijakan.

AIPAC yang merupakan salah satu kelompok lobi besar di Amerika Serikat, dan memang memiliki orientasi pro-Israel, tercatat dalam Lobbying Disclosure Act Senat AS melakukan aktivitas lobi secara resmi, dan melakukan

sponsor baik advokasi dan ekonomi dalam kebijakan mitra ekonomi Amerika Serikat dan Israel, serta kebijakan implementasi Abraham Accords (Clerk of the House of Representatives Legislative Resource Center 2023)

Sebagai salah satu kelompok lobi pro Israel yang memiliki bipartisan terbanyak di Amerika Serikat, dalam keterlibatannya sebagai kelompok lobi di Abraham Accords dan upaya membantu Amerika sebagai mediator di perjanjian ini, selain melakukan lobi di kongres Amerika Serikat, AIPAC secara aktif memberikan dukungan, penekanan kebijakan dan advokasi dalam hal ini. Dapat dilihat dengan tanggapan AIPAC terhadap H.R.2748-The Israel Normalization Of Act, yang di mana dalam undang-undang tersebut membahas tentang penguatan normalisasi dengan Israel dan penguatan serta perluasan Abraham Accords, mengutip dari situs TRACK AIPAC yaitu situs pelacakan kontribusi ekonomi AIPAC untuk kongres Amerika Serikat, salah satu sponsor dari kebijakan ini adalah Senator Jacky Rason dan AIPAC memiliki kontribusi lobi ekonomi yang besar untuk Jacky Rason sebesar \$2,3 Juta Dollar (Track Aipac, n.d).

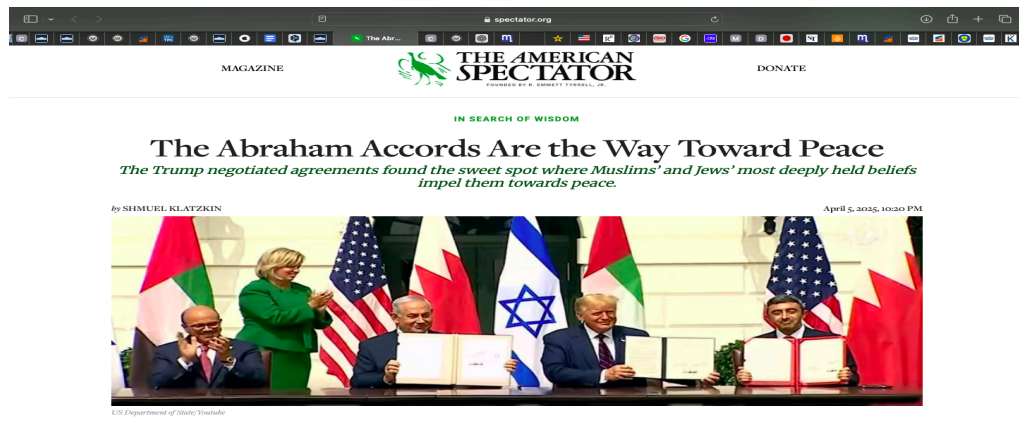
Dalam hal ini penulis melihat seberapa jauh keterlibatan AIPAC dalam perjanjian Abraham Accords, keterlibatan dari AIPAC benar-benar menjabarkan identitas mereka sebagai kelompok lobi, yang dimana mereka mempengaruhi Abraham Accords melalui lobi para anggota parlemen untuk mempengaruhi sebuah undang-undang terkait Abraham Accords, menjadi sponsor undang-undang normalisasi ini, melakukan proses lobi dengan parlemen Amerika Serikat terkait normalisasi tersebut dan juga membantu menjadi sponsor ekonomi dari anggota parlemen Amerika Serikat, yang dimana dari sponsor ekonomi tersebut anggota kongres akan melahirkan sebuah kebijakan seperti

2.4 *Mass Influencer*

Policy Influencer yang berikutnya adalah *Mass Influencer*, merupakan sebuah aspek yang dimana massa yang dapat mempengaruhi dapat pula menjadi sebuah opini publik yang mempengaruhi sebuah kebijakan. Sistem ini seringkali menggunakan media komunikasi massa, seperti surat, artikel, blog, radio, televisi dan dalam era globalisasi sekarang yaitu media sosial, dalam *Mass Influencer* opini publik lebih bersifat bebas dari intervensi ataupun keterlibatan dari para aktor pengambil keputusan, yang di mana kebebasan pers atau media pers dapat untuk menyajikan informasinya sendiri tanpa melibatkan aktor pengambil keputusan (William D Coplin 2003, 89)

Dalam salah satu berita yang penulis kutip yang berjudul "*The Abraham Accords Are The Way Toward Peace*" mencoba untuk membuat sebuah opini bahwa barack obama mendapatkan sebuah nobel perdamaian yang di mana ia membantu Iran menciptakan bom nuklir, tetapi ketika Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump kala itu mencoba berkomitmen dalam Abraham Accords sebagai simbol perdamaian dunia, tidak ada ada media bahkan komite nobel yang menanggapi hal tersebut, serta mengatakan bahwa pendukung demokrat dan simpatisan tidak mendukung Abraham Accords karena dinilai sebagai perjanjian perdamaian tidak membawa damai, dalam berita tersebut The American Spectator mengatakan bahwa orang-orang tersebut memiliki pemikiran yang konyol, bahkan menulis berita bahwa keraguan dan ketidakmampuan presiden berikutnya joe Biden, perjanjian ini tetap akan dilanjutkan.

Gambar 1.1 *The Abraham Accords Are the Way Toward*



Sumber : The American Spectator

<https://spectator.org/the-abraham-accords-are-the-way-toward-peace/>

**Gambar 1.2 *Trump Administration Poised to Broker More Deal
Between Israel and Muslim State***



Sumber : The American Spectators

<https://spectator.org/israel-serbia-kosovo-uae-abraham-accords/>

Dalam berita berikutnya yang ditulis oleh The American Spectators, membuat sebuah judul dengan narasi bahwa Donald Trump siap dalam menengahi kesepakatan normalisasi Israel dengan negara muslim lainnya. Pada awal paragraf artikel menjelaskan bahwa Amerika Serikat dikatakan berhasil dalam menjadi mediator di beberapa negara seperti Kosovo dan Serbia dan secara garis besar pada artikel tersebut membahas bagaimana mobilisasi Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump menjadi mediator dan perkembangan negara-negara dalam agenda normalisasi dengan Israel, dikatakan pula bahwa pemerintahan Donald Trump mendapat manfaat dalam perjanjian ini, pasalnya dalam kurun waktu kurang dari sebulan perjanjian ini berkembang pesat, yang dimana menyusul beberapa kunjungan luar negeri Mike Pompeo ke beberapa negara yang muslim. Jelas pada artikel tersebut membuat sebuah *clickbait* seolah olah Donald Trump berhasil dan siap menjadikan Amerika Serikat sebagai perantara negara-negara muslim khususnya melakukan normalisasi dengan Israel.

Gambar 1.3 *Trump's Abraham Accords Soldier on Despite Biden's Ineptitude*

Trump's Abraham Accords Soldier On Despite Biden's Ineptitude

Normalization efforts continue, without Biden's involvement.



Sumber : The American Spectator

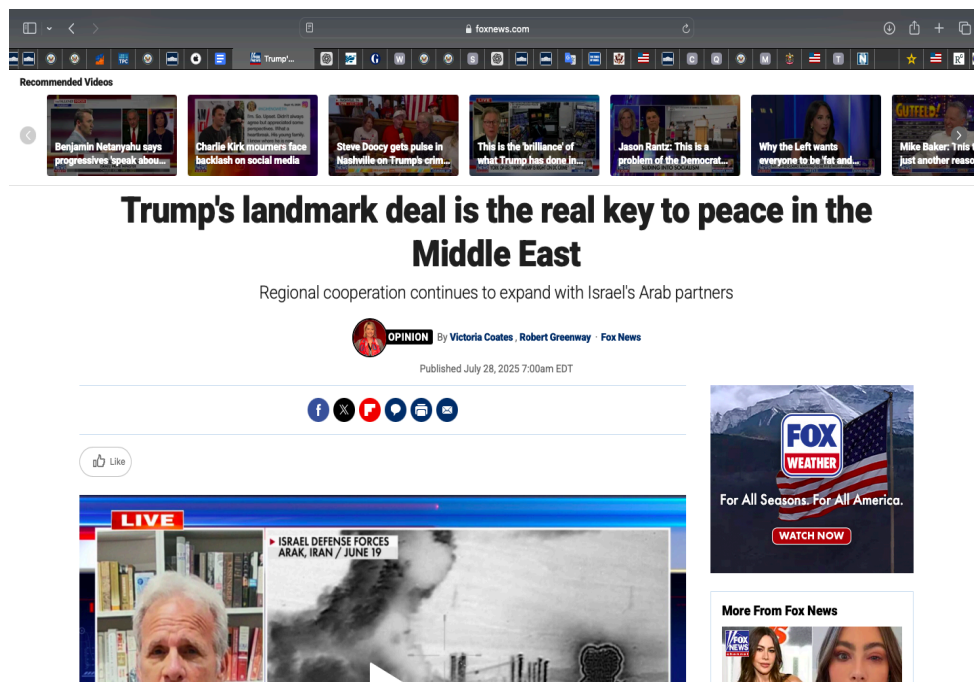
<https://spectator.org/success-abraham-accords-first-year/>

Media dari *The American Spectators* yang penulis kutip pula yaitu *Trump's Abraham Accords Soldier On Despite Biden's ineptitude*. Dari judul tersebut menunjukkan kritik terhadap presiden yang akan menggantikan Donald Trump yaitu Joe Biden kala itu, yang dimana mengatakan bahwa Joe Biden tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut. Dalam paragraf awal pada artikel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Agustus, pemerintahan Donald Trump berhasil membuat kesepakatan normalisasi Israel dengan Bahrain, Maroko dan Sudan, sedangkan Joe Biden belum melakukan apapun terkait perjanjian tersebut. Secara garis besar dalam artikel tersebut menyebutkan keberhasilan perkembangan diplomatik normalisasi dengan Israel yang dimana Amerika Serikat di masa pemerintahan Trump berhasil melakukan normalisasi serta dampak positif dari normalisasi tersebut dirasakan oleh negara-negara yang menandatangani, seperti Maroko yang melakukan hubungan kerjasama pertanian dan perairan, dan menjadi sebuah artikel kritik tajam terhadap Joe Biden yang tidak melakukan apapun terkait perjanjian ini, disisi lain Donald Trump berhasil menjadi mediator di Abraham Accords.

Media berita yang berikutnya yaitu Fox News, Fox New, salah satu berita yang ditulis oleh Fox News yang dimana menyoroti Abraham Accords yaitu” *Trump landmark deal is the real key to peace in Middle East*”. Dalam berita yang ditulis ini, pada kalimat pembukanya sudah langsung membahas bahwa tidak adanya sebuah perjanjian selama ini yang membawa perdamaian pada permasalahan Israel dan Palestina, namun justru perdamaian-perdamaian sebelumnya justru memperburuk keadaan, dan Abraham Accords yang ditengahi

oleh Presiden Donald Trump menjadi jawaban dalam permasalahan yang tidak kunjung usai tersebut, bahkan dinarasikan bahwa Presiden Donald Trump berhak mendapatkan sebuah nobel perdamaian. Narasi berikutnya yang ditulis bahwa perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian bersejarah yang diusung oleh Presiden Donald Trump, gagal dimanfaatkan atau diperluas oleh Joe Biden, serta mengatakan bahwa pihak yang peduli pada permasalahan Palestina dan Israel ini seharusnya mendukung pencapaian Donald Trump pada perjanjian ini (Victoria Scoates 2025).

Gambar 1.4 Trump Landmark Deal Is the Real Key to Peace in Middle East

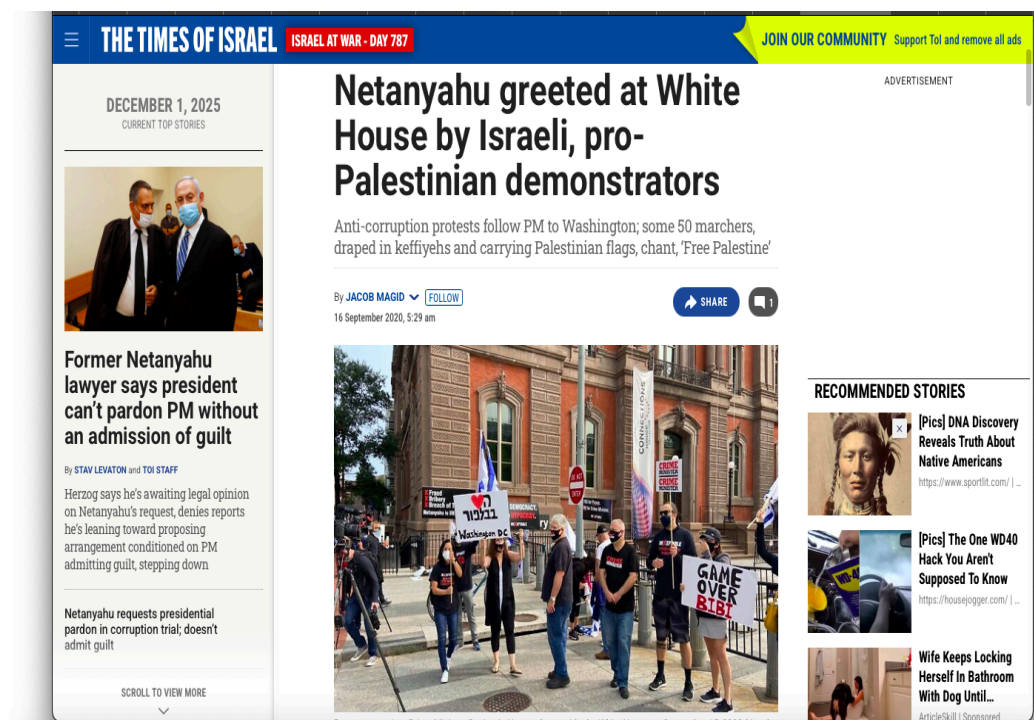


Sumber: Fox News

<https://www.foxnews.com/opinion/trumps-landmark-deal-real-key-peace-middle-east>

Di sisi lain, gelombang protes dalam negeri Amerika Serikat bermunculan pula terkait proses normalisasi atau perjanjian Abraham Accords ini, mengingat bahwa banyak pula masyarakat Amerika Serikat yang mengecam tindakan Israel. Dalam hal ini dapat melihat bagaimana respon dari Pemerintahan Amerika Serikat ketika adanya sebuah pemberitaan negatif tersebut, apakah adanya sebuah peninjauan kebijakan ketika adanya adanya berita negatif terkait pengambilan keputusan yang dilakukan tersebut.

Gambar 1.5 Netanyahu Greeted at White House by Israeli, Pro Palestinian Demonstrator



Sumber: Times Of Israel

<https://www.timesofisrael.com/netanyahu-greeted-at-white-house-by-israeli-and-pro-palestinian-demonstrators>

Gambar 1.6 *Palestinians Fire Rockets at israel Wounding Two, During White House Ceremony*

Palestinians fire rockets at Israel, wounding two, during White House ceremony

By Jeffrey Heller

September 16, 2020 2:43 AM GMT+7 · Updated September 16, 2020



JERUSALEM (Reuters) - Palestinian militants fired rockets from Gaza into Israel, wounding two people, on Tuesday at the same time as Israel and two Gulf Arab states signed normalisation agreements at the White House in Washington.

There was no immediate claim of responsibility for the attack from the Hamas Islamist-run territory.

Palestinians, who seek an independent state in the occupied West Bank and Gaza view the U.S.-brokered deals between Israel, the United Arab Emirates and Bahrain as betrayal of their cause.

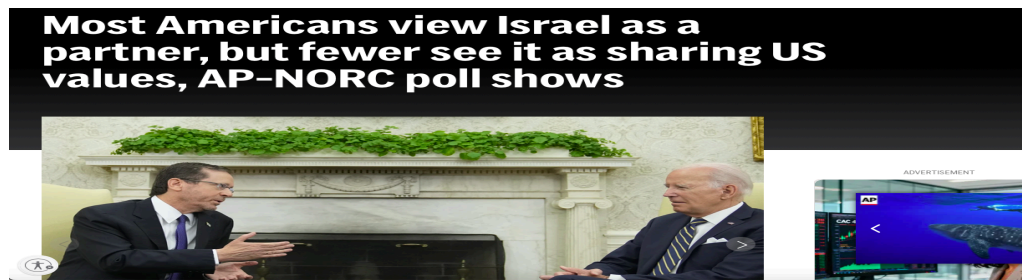
Sumber: Reuters

<https://www.reuters.com/article/world/palestinians-fire-rockets-at-israel-wounding-two-during-white-house-ceremony-idUSKBN2662YQ/>

Dalam dua artikel tersebut, dikatakan bahwa ketika Perdana Menteri Israel Netanyahu datang ke Amerika Serikat untuk membahas normalisasi, ada sekelompok gelombang demonstran Pro Palestina yang menolak kedatangan dan menolak normalisasi dengan Israel. Pada artikel yang kedua menjelaskan bahwa ketika penandatanganan Abraham Accords di Gedung Putih adanya sebuah ketegangan di beberapa wilayah, sepertinya adanya sebuah rudal yang ditembakkan ke Israel, dan juga gelombang demonstrasi yang mengatakan bahwa normalisasi ini akan sangat merugikan Palestina (Jacob Magid 2020). Namun walaupun sebelum normalisasi adanya sebuah gelombang demonstran yang menolak, dan adanya sebuah ketegangan di waktu yang sama dengan

penandatanganan Abraham Accords, hal tersebut tidak menjadi penghalang, dan dapat dikatakan bahwa beberapa permasalahan tersebut seolah dianggap hal yang tidak akan mengubah perjanjian (Jeffrey Heller 2020).

Gambar 1.7 *Most American View Israel as a Partner, but Fewer See It as sharing US Values, AP-NORC Poll Shows*



Sumber: *Associated Press News*

<https://apnews.com/article/poll-israel-united-states-biden-netanyahu-41ba5cb18985f3e4956f4465c00999f>

Dapat dilihat dalam *Mass Influencer ini* terkait bagaimana sebuah opini publik masyarakat Amerika Serikat tentang Abraham Accords, mayoritas warga Amerika Serikat menilai bahwa Israel sebagai mitra, dan 61% tidak menyetujui cara Joe Biden menangani kasus normalisasi ini, 44% warga menilai hal normalisasi sebelumnya sudah tepat. Bahwasanya survey memang condong memiliki presentasi positif pada saat Donald Trump menangani permasalahan normalisasi dibandingkan dengan era Joe Biden (Matthew Lee and Linley Sanders 2023).

BAB 3

**KONDISI EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS
INTERNASIONAL DALAM KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT
MENJADI MEDIATOR DALAM *ABRAHAM ACCORDS 2020***

3.1 Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam penjelasan berikutnya, yaitu determinan kondisi ekonomi dan militer Amerika Serikat, yang dimana pada penjelasan ini akan melihat lebih dalam terkait bagaimana kondisi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat, dan nantinya hal tersebut akan berdampak pada stabilitas ekonomi dalam negerinya dan bagaimana ekonomi tersebut berdampak pada mobilisasi ekonomi internasional Amerika Serikat. Di sisi lain, kapasitas militer Amerika Serikat perlu dilihat lebih dalam dari segi kekuatan militernya. Dari dua hal ini barulah dapat dilihat relevansi kondisi ekonomi dan militer Amerika dengan Abraham Accords.

3.1.1 Kapasitas Barang dan Jasa Serta Ketergantungan Pada Perdagangan dan Finansial Internasional

Dalam melihat kondisi ekonomi dari Amerika Serikat, maka tentunya perlu melihat sebuah analisa terkait kemakmuran negara tersebut, dan sejauh mana hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan, secara garis maka perlunya sebuah penganalisaan pola pertumbuhan ekonomi (William D Coplin 2003, 115). Penulis menilai penggunaan konsep dengan melihat sebuah *gross national product* (GNP) dalam suatu negara merupakan cara paling efektif untuk melihat bagaimana seluruh barang dan jasa yang diproduksi sebuah negara dalam skala

per tahun, karena GNP merupakan total barang dan jasa yang dihasilkan baik dalam maupun luar negeri, maka semakin besarnya GNP maka besar pula kapasitas negara dalam membuat sebuah output ekonomi yang nantinya dapat dialokasikan dalam beberapa sektor, seperti kebijakan dalam negeri maupun pembangunan dalam negeri. Pada masa awal kepemimpinan Donald Trump seperti penjabaran pada sebelumnya, ekonomi Amerika Serikat menunjukkan angka signifikan, terhitung dari 3 tahun dari masa awal kepemimpinannya GNP naik dengan cukup signifikan.

Tabel 1.1 Gross National Product United States 2017-2021

Tahun	GNP	Jumlah Jiwa	Per-Kapita
2017	19,5	325,7	59,900
2018	20,5	327,9	62,600
2019	21,4	330,3	64,800
2020	20,9	332,6	62,900
2021	22,0	335,0	65,800

SUMBER : Federal Bank of st-louis <https://fred.stlouisfed.org/series/gnp/>, United States Census Bureau <https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-national-total.html>

Jika mengacu pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tren GNP sebagai salah satu kapasitas dalam produksi bisa dibilang cukup positif, hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi dan *output* dari ekonomi Amerika Serikat

meningkat tiap tahunnya pada tahun 2017 hingga 2021, kecuali pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, dari kenaikan tersebut dapat dilihat bahwa kapasitas produksi nasional Amerika Serikat terus meningkat. Populasi Amerika Serikat bisa dilihat pula setiap tahunnya meningkat, yang di mana populasi tentunya menjadi salah satu komponen tenaga kerja, distributor dan konsumen, dalam hal populasi ini, Amerika Serikat memiliki struktural sumber daya manusia terkait memproduksi dan penyerapan produk nasional. Sedangkan indikator GNP per kapita dapat mengukur angka produktivitas per individu, peningkatan dari 59,900 pada tahun 2017 dan tahun 2021 di angka 65,800, menunjukkan bukan hanya produksi yang mengalami peningkatan tetapi populasi sebagai agen produsen dan jasa menunjukkan kenaikan pula.

Salah satu hal yang paling signifikan menyebabkan kenaikan GNP Amerika Serikat ini adalah, deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump yaitu *Tax cut and jobs act* pada tahun 2017, TJCA atau *Tax Cut And Jobs Act*, yang dimana TJCA ini menitikberatkan kepada beberapa perubahan pada sektor pajak, seperti tarif pajak individu diturunkan, pajak korporat diturunkan menjadi 21%, berlakunya sistem pajak internasional dengan sistem pajak teritorial, sistem pengembalian aset pajak investor dari dalam negeri ke negara asalnya. Dapat dilihat dari regulasi Amerika Serikat ini, salah tujuannya dari penerapan kebijakan baru dari TJCA ini adalah menaikkan secara drastis pendapatan Amerika Serikat dari sektor perpajakan, untuk mendorong bisnis individu, mendorong investasi yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan dari penguatan ekonomi nasional yang didapat Amerika Serikat dari regulasi ini diharapkan dapat untuk menguatkan posisi kompetitif Amerika Serikat di sektor

ekonomi global tentunya jika penguatan ekonomi dalam negeri ini berhasil (Internal Revenue Service, 2025).

Dari stabilnya ekonomi dalam negeri di Amerika Serikat pada periode 1 Donald Trump dalam ruang lingkup kapasitas produk barang dan jasa, maka perlu pembuktian berikutnya yang dapat menguatkan pandangan, apakah pada periode 1 Donald Trump tersebut, bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat dalam skala internasional kali ini, hal tersebut dapat diukur kembali dengan tahapan bersifat ekonomi lainnya yaitu dengan ketergantungan Amerika Serikat pada finansial dan perdagangan internasional. Dalam hal tersebut penulis akan melihat dari sisi neraca Amerika Serikat, neraca yang merupakan laporan keuangan yang dimana terdapat sebuah aktivitas keuangan negara sangat penting untuk dilihat untuk mengetahui bagaimana sebuah mobilisasi keuangan yang masuk dan keluar dalam sebuah negara, pertama yang perlu dilihat yaitu neraca pembayaran Amerika Serikat, neraca pembayaran ini akan mencatat transaksi yang sifatnya ekonomi negara dengan negara yang lain.

Ternyata dengan beberapa kebijakan yang dilakukan Donald Trump di awal kepemimpinan periode pertamanya dan tren positif kondisi ekonomi nasional, menjadi bumerang terhadap mobilisasi ekonomi internasionalnya, terjadi tren defisit yang melonjak pada awal masa kepemimpinan Donald Trump, yang dimana pada tahun 2018 terjadi defisit anggaran sebesar \$779 miliar dan defisit ini lebih besar \$113 dari tahun sebelumnya dan defisit ini terus melonjak sehubungan pula dengan pandemi Covid-19 melanda (U.S Department Of The Treasury 2018).

Dalam neraca perdagangan pula, Amerika Serikat mendapat tren yang

buruk, dalam neraca perdagangan terjadi defisit perdagangan di Amerika Serikat pada periode 1 Donald Trump, defisit perdagangan Amerika Serikat menyentuh angka \$621 miliar, dimana ekspor barang Amerika Serikat di angka \$148 miliar dan impor barang dan jasa di angka \$217 miliar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa baik dari neraca perdagangan dan pembayaran, Amerika Serikat mendapat tren yang buruk (Bureau of Economic Analysis 2019).

Pada dasarnya neraca perdagangan dan pembayaran merupakan satu kesatuan, namun neraca perdagangan mencatat transaksi meliputi impor ekspor dan hanya mencatat transaksi meliputi barang, baik itu ekspor ataupun impor barang, sedangkan neraca pembayaran meliputi seluruh transaksi yang meliputi negara dengan negara yang lainnya. Dalam tren buruk ketidakstabilan neraca Amerika Serikat tersebut, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa hal tersebut terjadi:

1. Kebijakan *Tax cut and jobs act*, penulis sudah menjabarkan terkait TJCA sebelumnya. Mengapa kebijakan ini menjadi salah satu yang mempengaruhi tren buruk neraca Amerika Serikat, karena pada TJCA terjadi sebuah reformasi sistem perpajakan besar besaran, yang dimana pemangkasan pajak terjadi di beberapa ruang lingkup, seperti pajak rumah tangga, barang jasa, korporat, pajak investasi, bahkan mengubah sistem pajak internasional, memang secara implementasi diharapkan akan mendorong progresifitas ekonomi nasional, namun jika dilihat hal tersebut bisa untuk mengakibatkan penurunan pendapat bank federal dan dari reformasi pajak besar-besaran ini pemerintahan Amerika Serikat tidak melakukan pengurangan terhadap pengeluaran pemerintah. Bukan hanya ketimpangan tersebut, TCJA pula

yang diharapkan menjadi sebuah pemasukan besar untuk pemerintah, namun ternyata pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan progres finansial internasional Amerika Serikat.

2. Peningkatan pengeluaran dan anggaran meningkat drastis, salah satu penyebab ketimpangan neraca Amerika Serikat pula yaitu peningkatan pengeluaran dan anggaran beberapa sektor yang meningkat salah satunya anggaran militer, anggaran militer Amerika Serikat melonjak drastis di angka \$718 miliar dan ini tidak sebanding antara pemasukan dan pengeluarannya, dan hal ini dapat menjadi salah satu hal yang secara rasional menyebabkan ketimpangan neraca tersebut (U.S Department of Defense 2017).
3. Impor lebih tinggi dari ekspor, penyebab ketidakseimbangan berikutnya dalam kapasitas produksi barang dan jasa, Amerika Serikat lebih banyak membeli barang dari luar negeri dalam artian bisa diartikan ketergantungan dan membuat defisit terjadi.

Dalam melihat kondisi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat dengan produk barang dan jasa melalui *Gross National Product* tadi, ada beberapa tindakan intensif Donald Trump sendiri untuk memajukan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat, beberapa kebijakan dan mobilitas produk barang dan jasa Amerika Serikat, membuktikan bahwa adanya sebuah tindakan ekonomi progresif dalam negeri Amerika Serikat. Namun dari stabilnya mobilisasi ekonomi produk barang dan jasa tersebut bukan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan produktivitas ekonomi internasional, melihat faktanya bahwa neraca pembayaran dan perdagangan Amerika Serikat yang berbanding terbalik

atau timpang dengan stabilnya ekonomi dalam negeri Amerika Serikat. Maka dapat dilihat dari ketidakstabilan ekonomi Amerika Serikat khususnya dalam ranah internasional, adanya sebuah kecenderungan negara dalam memperbaiki ekonomi dapat dilihat dari hal tersebut.

Dengan adanya Abraham Accords tentunya menjadi sebuah faktor pendorong besar ekonomi Amerika Serikat, adanya beberapa isi dari Abraham Accords yang memang menekankan adanya sebuah perjanjian ekonomi, menjadi sebuah stimulus untuk mendapatkan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam berbagai ruang lingkup. Berangkat dari kondisi Amerika Serikat yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, adanya Abraham Accords ini terbukti bahwa beberapa kerjasama terjadi antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Abraham Accords, jadi dapat dilihat bahwa linieritas antara kondisi ekonomi Amerika Serikat ini dengan Abraham Accords yaitu pemulihan dan stimulus ekonomi Amerika Serikat dalam keterlibatannya di Abraham Accords dan nantinya Abraham Accords akan menjadi sebuah ladang ekonomi untuk Amerika Serikat, hal ini akan penulis jabarkan di point ekonomi dalam konteks internasional nantinya.

3.1.2 Dimensi Kemampuan Militer: Kapasitas dalam Penggunaan Kekuatan Militer

Dalam kondisi yang berikutnya dalam dimensi ini, yaitu kondisi militer agar dapat mengetahui dan melihat bagaimana kondisi militer Amerika Serikat. Dalam kondisi militer ini ada beberapa sifat atau kondisi yang perlu diketahui, yaitu sifat atau kondisi perlengkapan militer, tingkat pelatihan militer dan jumlah

militer (William D Coplin 2003, 124). Dari hal-hal tersebut penulis dapat melihat dari berbagai aspek terkait bagaimana kondisi militer Amerika Serikat ini.

Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menaikkan anggaran militer, kenaikan anggaran militer ini cukup tinggi yang sebelumnya batas anggaran militer Amerika Serikat yaitu \$52 menjadi \$639,1 miliar. Tingginya kenaikan anggaran militer Amerika Serikat ini dikatakan sebagai upaya pemulihan dan pemaksimalan militer Amerika Serikat, yang dimana di era Presiden sebelumnya adanya pemotongan anggaran militer dan hal tersebut berdampak untuk beberapa proyek besar militer Amerika Serikat, pada era Donald Trump inilah proyek yang sempat tertunda tersebut akan dijalankan, meliputi, pemeliharaan, modernisasi dan pemulihan militer (U.S Department of Defense 2017).

Dalam upaya peningkatan perlengkapan angkatan militer Amerika Serikat, Amerika Serikat membeli peralatan militer dan juga adanya modernisasi senjata militer, seperti Amerika Serikat memperbaharui beberapa pesawat militernya dan juga memperbaharui kapal induk militer dan kapal perang, serta Amerika Serikat meningkatkan pengupayaan modernisasi rudal perangnya, pada aspek nuklir Amerika Serikat melanjutkan proyek nuklir Amerika Serikat dan modernisasi senjata nuklir mereka dan pada pengembangan rudal balistik terbarunya, yaitu rudal balistik interkontinental serta turut memperbaharui sistem cyber nuklir dan militer mereka. Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa kondisi militer Amerika Serikat, dalam koridor pembelian alat dan modernisasi militer dapat dikatakan aktif (trump white house, 2020).

Dalam penjelasan berikutnya, penulis lebih menekankan bukan dari segi

seberapa banyak kuantitas sumber daya manusia militer sebuah negara, tetapi penulis melihat dari bagaimana sebuah kuantitas tersebut apakah memiliki kapasitas sebagai militer yang terlatih atau tidak terlatih, karena dapat dilihat beberapa negara seperti Korea Utara dan Iran yang memiliki kuantitas yang banyak dari sumber daya manusia dalam militer tetapi Korea Utara tidak memiliki peralatan militer yang memadai dan Iran komponen militer utamanya cenderung dari segi pelatihan dan profesionalisme sebagai angkatan militer resmi cenderung rendah. Maka dari itu dua komponen antara jumlah militer dan juga pelatihan dalam militer harus berkesinambungan untuk mencapai komponen militer yang ideal.

Dalam kuantitas sumber daya manusia untuk militer, Amerika Serikat memiliki banyak memiliki anggota militer, dari banyaknya anggota militer ini pula Amerika Serikat menjadi negara yang aktif dalam melakukan pelatihan profesional untuk menjadikan militer Amerika Serikat menjadi militer yang ideal. Salah satu proyek pelatihan dari besarnya anggaran militer pada periode 1 Donald Trump adalah proyek pelatihan militer *Army Future Command*, yang dimana pada pelatihan ini berfokus pada bagaimana upaya militer Amerika Serikat yang melatih anggota militer dengan modernisasi senjata militer Amerika Serikat serta bagaimana anggota militer Amerika Serikat dapat untuk terbiasa dengan senjata modifikasi atau senjata yang berbasis teknologi, serta masih banyak pula pelatihan-pelatihan profesional dalam militer Amerika Serikat.

Bukan hanya dalam skala nasional, pelatihan militer Amerika Serikat pula dilakukan dalam skala internasional, salah satu contoh pelatihan skala

internasional besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melibatkan negara lain yaitu *Rim Of The Pacific Exercise (RIMPAC)*, yang dimana melibatkan beberapa negara seperti Indonesia, Jepang, Australia, pelatihan ini mencakup Militer darat, udara dan laut, serta pelatihan ini pula dapat menjadi strategi diplomasi publik Militer Amerika Serikat serta menjadi kerjasama maritim dan militer kawasan indo-pasifik (Chulanee Attanayake 2018.)

Dengan kuantitas sumber daya manusia yang banyak untuk militer di Amerika Serikat dan juga persenjataan yang memadai, perlu di lihat pula bagaimana sebuah negara dalam konteks militernya memiliki sebuah ketergantungan pada sumber luar negeri, entah itu pada sumber luar negeri yang bersifat barang ataupun sumber luar negeri yang bersifat jasa, biasanya dengan adanya ketergantungan pada sumber luar negeri, negara pemasok cenderung memiliki kontrol pada negara yang menjadi konsumen. Salah satu negara yang menjadi distributor senjata militer di dunia adalah Amerika Serikat. Disini penulis akan menjabarkan beberapa diplomasi senjata militer Amerika Serikat dan juga jasa militer internasional dengan negara-negara Abraham Accords.

Salah satu diplomasi militer Amerika Serikat dengan negara Abraham Accords adalah Uni Emirat Arab, disini Amerika Serikat berperan sebagai distributor dan Uni Emirat Arab sebagai konsumen. Pada tahun 2020 Mike Pompeo selaku Menteri Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengajukan sebuah bentuk kerjasama strategis dengan Uni Emirat Arab yang dimana Amerika Serikat akan melakukan penjualan senjata militer seperti pesawat tempur, helikopter, drone militer dan sebagai macamnya, dengan alibi bahwa kerjasama ini untuk membantu penguatan militer Uni Emirat Arab, menjadi awal

penguatan mitra strategis militer, membantu pertahanan militer Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah, membantu Uni Emirat membendung ancaman kawasan dari Iran dan menjadi salah satu penguatan kerjasama regional Uni Emirat Arab dengan Israel yang akan difasilitasi oleh Amerika Serikat (Defense Security Cooperation Agency 2025).

Negara Abraham Accords yang melakukan pembelian senjata militer dengan Amerika Serikat juga yaitu Bahrain, ada beberapa diplomasi senjata yang dilakukan Bahrain dengan Amerika Serikat, seperti pesawat tempur, tank, dan navigasi militer, bahkan Bahrain melakukan kerjasama senjata militer nuklir dengan Amerika Serikat. Bukan hanya pembelian senjata militer yang dilakukan oleh Bahrain dan Amerika Serikat, Bahrain menyetujui menjadi tuan rumah *International Maritime Security Construct* yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump pada kala itu, *International Maritime Security Construct* ini merupakan sebuah operasi militer maritim yang dimana salah satu fungsinya yaitu untuk menjaga kawasan teluk dari ancaman Iran, Amerika Serikat melalui operasi dan perdagangan senjata tersebut memiliki alibi yang sama dengan negara timur tengah yang akan bergabung dengan Abraham Accords juga, yaitu untuk membantu Bahrain melengkapi dan memperkuat persenjataan militer untuk menekan intervensi Iran. Dalam perdagangan senjata dan operasi militer ini, bahkan dikatakan bahwa sekitar 80% persenjataan militer Bahrain berasal dari Amerika Serikat (Congressional Research Service 2020).

Jika berbicara bagaimana ketergantungan pada sumber luar negeri dari konteks militer bukan hanya barang melainkan prajurit militernya, penulis menggaris bawahi yaitu penyebaran jaringan militer Amerika Serikat di

beberapa negara terkhusus timur tengah, yang dimana tidak ada prajurit atau jaringan militer yang menetap secara permanen di Amerika Serikat tetapi Amerika Serikat memiliki prajurit dan jaringan militer yang menetap atau dalam skala panjang di beberapa negara khususnya timur tengah. Beberapa jaringan militer di Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya negara dalam Abraham Accords yaitu Bahrain dengan angkatan laut serta prajurit militer laut dengan tujuan untuk menjaga kawasan teluk, Uni Emirat Arab dengan militer pesawat udara, drone militernya dan prajurit militer. Hal ini menjadi landasan awal bahwa langkah ini menjadi sebuah situasi pengamanan geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah.

Salah satu negara dari anggota Abraham Accords yaitu maroko aktif melakukan pembelian senjata dengan Amerika Serikat, diplomasi senjata militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat, pembelian senjata ini meliputi helikopter militer, mobil baja, rudal balistik dan beberapa persenjataan militer lainnya, pembelian senjata militer Maroko ini sebelumnya tidak seaktif pada biasanya, khususnya pada tahun 2019 dan 2020, bahkan menurut beberapa laman berita Maroko, senjata militer Maroko hampir sekitar 85% hingga 90% militer yaitu dari Amerika Serikat (Jennifer Morgan Hekking 2020). Namun yang menjadi sebuah hal yang dapat dilihat adalah, mengapa pembelian senjata militer Maroko di periode pertama Donald Trump begitu gencar, yang di mana memang dulu adanya sebuah kebijakan yang sulit antara diplomasi militer Maroko dan Amerika Serikat.

Ada beberapa dua poin penting yang mendasari hal tersebut, yaitu adanya sebuah kebijakan yang di Presiden sebelumnya tidak disetujui dan juga

pengakuan oleh Amerika Serikat melalui Donald Trump, yang dimana pada era Barack Obama, yang dimana Barack Obama meminta peninjauan ulang terkait pelanggaran HAM maroko di daerah Sahara Barat yang di mana hal itu memicu ketegangan politik dan Maroko merespon salah satunya dengan pembatalan latihan militer strategis antara militer Maroko dan Amerika Serikat, hal ini menurut penulis yang menyebabkan ketegangan politik dan mengganggu diplomasi senjata militer Amerika Serikat dengan Maroko. Disisi lain di era pertama Donald Trump, Amerika Serikat mengakui pemerintahan Maroko atas Sahara Barat dan merubah haluan Amerika Serikat menjadi pro Maroko, menjadi langkah awal hubungan diplomatik secara mendalam antara Amerika Serikat dengan Maroko (Trump White House 2020).

Dalam hal ini dapat dilihat, dengan kapasitas militer yang dimiliki Amerika Serikat, dari berbagai ruang lingkup, seperti kuantitas pasukan, kualitas pasukan, dan perlengkapan militernya, tentunya menjadi salah satu pendorong beberapa aspek Amerika Serikat di Abraham Accords ini, pertama dapat dilihat bahwa dengan kapasitas militer Amerika Serikat ini dapat mendorong kerjasama persenjataan militer seperti Bahrain dan Maroko misalnya, serta di Timur Tengah yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Poin penting dalam konteks militer ini dan aspek Amerika Serikat menjadi mediator adalah, dari kapasitas militer ini Amerika Serikat melakukan beberapa mobilisasi militernya seperti di Timur Tengah, dalam penempatan militernya, operasi-operasi militer, khususnya di kawasan teluk dengan alibi menekan pengaruh Iran dan menjaga perdamaian kawasan. Maka dari itu dapat dilihat dengan kapasitas militer Amerika Serikat tersebut sebagai pemasok senjata

militer, kerjasama militer hingga operasi militer, menjadikan *branding* Amerika Serikat sebagai penjaga kawasan, dapat untuk memberikan sebuah perlindungan militer (Trump White House 2018). Inilah menjadi sebuah aspek *leverage* atau daya tawar Amerika Serikat menjadi mediator di Abraham Accords.

3.2 Konteks Internasional Amerika Serikat dalam Abraham Accords

Ketika membahas mengenai alasan perilaku negara dalam mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini Amerika Serikat dalam Abraham Accords, yang dimana Abraham Accords sebuah perjanjian internasional, maka perlu melihat bagaimana perilaku politik luar negerinya. Maka dari itu, dalam konteks internasional ini akan membahas konteks internasional Amerika Serikat meliputi geografis, ekonomi dan politis.

3.2.1 Geografis

Dalam konteks internasional elemen pertama yaitu geografis, William D Coplin menjelaskan bahwa sejatinya sebuah konsep konteks internasional geografis akan meliputi perdagangan, dan jalur-jalur perdagangan khususnya (William D Coplin 2003, 167). Sebuah negara dalam proses pengambilan kebijakan luar negerinya akan melihat sebuah elemen yang sangat penting, yaitu geografis dalam mengamankan geopolitiknya untuk mendapatkan atau menghasilkan kepentingan. Amerika Serikat dalam prosesnya menjadi mediator di Abraham Accords dapat dilihat arah gerak politiknya, misalkan dalam melihat kepentingan geopolitik di dua negara benua Afrika Abraham Accord yaitu Maroko dan Sudan. Penulis melihat masuknya Sudan ke Abraham Accords

karena ingin sebuah aktivitas diplomasi lebih aktif baik dari segi ekonomi atau lainnya, politik negosiasi agresif internasional dalam ruang lingkup geografis yang diambil oleh Amerika Serikat adalah mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme yang diberikan oleh Amerika Serikat sejak lama untuk Sudan, agar Sudan masuk dalam dalam aliansi Abraham Accords (U.S Department Of State, 2020).

Penulis menilai dari perlakuan Amerika Serikat kepada Sudan tersebut dapat mengamankan geopolitik Amerika Serikat di Sudan, misalkan Amerika Serikat dapat untuk mengamankan pengaruhnya di jalur perdagangan laut di laut merah, karena Sudan dekat dengan laut merah dan dapat dibilang aktif dalam jalur perdagangan laut. Pola yang sama pula dilakukan dengan Maroko, penulis beranggapan lokasi geografis Maroko yang terletak di pintu masuk jalur perdagangan laut Mediterania dan Maroko sangat aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi disana, akan menguntungkan Amerika Serikat. Ini pun berlaku pada negara Abraham Accords lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Israel, Bahrain, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa Amerika Serikat memiliki daya tawar dengan militernya, dan juga sebagai penjaga kawasan, ada beberapa konteks yang sempat disinggung pula yaitu Amerika Serikat ikut memberikan pandangannya dengan negara-negara Timur Tengah dalam Abraham Accords dalam menekan pengaruh Iran (U.S. Department Of The Treasury 2020).

Dengan beberapa penekanan Amerika Serikat terhadap Iran yang memang ada disinggung dalam Abraham Accords, secara tidak langsung Amerika Serikat membuat sebuah koalisi atau blok di Timur Tengah dengan orientasi ekonomi dan militer tadi, yang dimana hal ini dilakukan untuk melakukan pengamanan

posisi geopolitik Amerika Serikat di kawasan tersebut negara negara tersebut seperti di selat Hormuz, posisi Israel di antara Eropa, Asia dan Afrika, hingga dapat mendapat akses strategis geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah (George C. Marshall European Center for Security Studies 2020).

3.2.2 *Ekonomi*

Dalam elemen berikutnya elemen ekonomi dalam konteks internasional, elemen ini menurut Coplin dalam konteks ekonomi, negara berkembang atau negara yang belum dalam skala maju, cenderung membutuhkan mobilisasi internasional dalam menopang negaranya serta membutuhkan butuh bantuan, dan juga dalam elemen ini, negara maju cenderung memiliki sebuah permasalahan dalam lingkungannya sendiri (William D Coplin 2003, 167).

Dapat dilihat bahwa Sudan dan Maroko bergabung dalam Abraham Accords salah satu orientasinya adalah *aid diplomacy* dari Amerika Serikat dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, yang dimana dalam konteks internasional determinan ekonomi, negara berkembang membutuhkan mobilisasi ekonomi untuk menopang negaranya. Dalam definisi ekonomi konteks internasional diatas pula menjelaskan bahwa negara maju memiliki sebuah permasalahan di lingkungannya sendiri, dapat dilihat dengan Amerika Serikat memiliki permasalahan ekonomi dalam negerinya dalam ketimpangan produk barang jasa dan neraca perdagangan, neraca pembayaran, yang membuat Amerika Serikat menguatkan mobilisasi ekonomi negaranya.

Berangkat dari hal tersebut, dalam penjelasan konteks militer sebelumnya, Amerika Serikat menjadi pemasok beberapa senjata militer, Uni emirat Arab

pula menjalin sebuah kesepakatan dan diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat dalam sektor investasi, energi dan teknologi pada 2021, serta Bahrain yang menandatangani sebuah nota kesepakatan kerjasama ekonomi *United States Trade Zone* dalam kerjasama ekonomi perdagangan, menjadi sebuah alat politik untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya dalam lingkup ekonomi (U.S. Department of Commerce 2017-2021). Tentunya dari hal tersebut, akan sangat menguntungkan dan memajukan ekonomi negara-negara yang menandatangani Abraham Accords termasuk Amerika Serikat, dan dapat memperbaiki ketimpangan-ketimpangan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat tersebut (U.S. Department Of The Treasury 2020).

3.2.3 *Politis*

Maksud dari politis yang akan coba di jelaskan pada sub bab kali ini yaitu, adanya sebuah kehendak kepentingan domestik yang akan mempengaruhi lingkungan mitra internasional dalam membuat sebuah keputusan, menjadi sebuah poin penegasan terakhir yang akan ditekankan (William D Coplin 2003, 167). Berangkat dari awal bagaimana banyaknya pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan Amerika Serikat menjadi mediator, hingga kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat.

Dari kepentingan-kepentingan tersebut, Amerika Serikat dapat untuk menjadi mediator terkait bagaimana Amerika Serikat gencar mengirim pasukan ke Uni Emirat Arab, Bahrain dan melakukan kerjasama ekonomi militer yang kuat dengan Sudan, Maroko, dan juga adanya *aid Diplomacy* yang ditawarkan Amerika Serikat seperti pengakuan Sahara Barat dan pencabutan Sudan sebagai

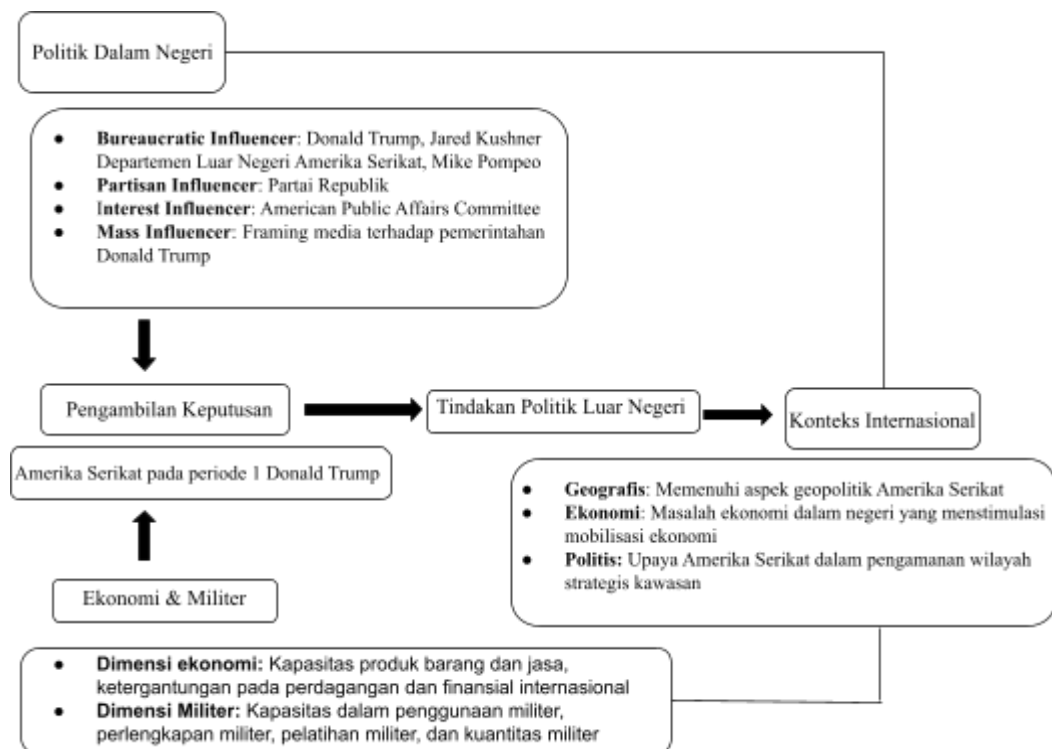
daftar teroris. Tentunya semua itu merupakan kehendak dari Amerika Serikat yang dimana berdampak besar bagi anggota-anggota Abraham Accords, hal ini untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya yang akan mempengaruhi lingkup internasional, yang dimana secara tidak langsung mengkonsolidasikan negara-negara untuk membangun sebuah kerjasama dengan penengah Amerika Serikat (Allison Minor, Daniel B. Shapiro, Amir Hayek, Loay Alshareef, Ahmed Khuzaie, Sarah Zaaimi 2025). Dapat dilihat pula dalam upaya kepentingan domestiknya, Amerika Serikat melalui Donald Trump aktif secara langsung ikut menandatangani beberapa deklarasi, yang dimana turut berkomitmen untuk menjaga kerjasama dan stabilitas dari Timur Tengah, dan melihat bahwa keberhasilan Amerika Serikat menstabilkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah (Trump White House 2020). Sebagai mediator inilah Amerika Serikat turut mendorong kepentingan domestik, untuk membangun sebuah kerjasama dan aliansi secara tidak langsung, baik dari Sudan dan Maroko dengan keterikatan *Aid Diplomacy* nya, dan pengaruh Amerika Serikat dalam membentuk kerjasama di negara Timur Tengah yang menandatangani Abraham Accords.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam komponen awal sebuah aspek pengambilan keputusan, politik dalam negeri dan kondisi ekonomi militer dapat untuk mendorong pengambilan sebuah keputusan negara, dan nantinya akan memunculkan sebuah tindakan politik luar negeri yang akan berpengaruh pada konteks internasional, dan determinan konteks internasional tersebut akan mempengaruhi politik dalam negeri serta kondisi ekonomi militer kembali, inilah yang nantinya menjadi sebuah rantai determinan-determinan dalam pengambilan keputusan atau *decision making*.



Sumber : *William D. Coplin*” (2003/30)

“empat determinan dapat mempengaruhi tindakan dalam politik luar negeri”

Dalam konteks Amerika Serikat sebagai mediator dalam Abraham Accords, dapat dilihat determinan-determinan yang akan saling mempengaruhi, sebuah pengambilan keputusan dapat didorong dari dua aspek, yaitu politik dalam negeri dan juga ekonomi & militer. Pada politik dalam negeri *Bureaucratic Influencer* yang disini yaitu membantu Departemen Luar Negeri dan Mike Pompeo membantu pengambilan keputusan dari segi mobilisasi internasional seperti melakukan kunjungan internasional, dan juga negosiasi, yang berikutnya yaitu *Partisan Influencer* yang dimana melalui Partai Republik, menjadi membantu dalam mengkonsolidasikan anggota-anggota partai nya seperti Donald Trump, dan juga turut membantu dalam membuat sebuah opini tentang Abraham Accords, yang ketiga yaitu AIPAC, yang dimana membantu dalam membuat sebuah opini, melakukan lobi, serta cenderung membantu dari segi ekonomi baik melalui aktor politik seperti anggota legislatif atau sebuah undang-undang, dan yang terakhir yaitu *Mass Influencer*, yang dimana disini melakukan *Framing* hal-hal baik terkait Pemerintahan Donald Trump, disini penulis menganalisa media Fox News dan The American Spectator.

Disisi lain ketika instrumen politik dalam negeri bekerja, perlu diperhatikan pula kondisi ekonomi dan militer Amerika Serikat, militer Amerika Serikat yang memang aktif dalam memperkuat kualitasnya dan dengan kuantitasnya banyak melakukan aktifitas negara dengan operasi militer atau penempatan militer, serta penjualan senjata militernya di beberapa negara Abraham Accords, memang dikatakan dalam skala aktif. Namun hal itu berbanding terbalik dari segi ekonominya, adanya sebuah ketimpangan neraca

perdagangan, neraca pembayaran, dan produk barang dan jasa di ruang lingkup ekonomi khususnya ekonomi internasional Amerika Serikat. Dalam analisa yang penulis lakukan, upaya Amerika Serikat menjadi mediator dapat dilihat untuk mendapatkan peluang ekonomi dan perdagangan dan kepentingan politiknya. Maka ketika determinan politik dalam negeri dan juga kondisi ekonomi dan militernya sudah dapat untuk dilihat dan dilakukan, aktor politik akan mengambil sebuah pengambilan keputusan.

Ketika aktor politik mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini yaitu Pemerintahan Donald Trump pada periode pertamanya, hal itu akan memicu sebuah pola tindakan politik luar negeri, yang nantinya akan berdampak pada konteks internasionalnya. Dapat dilihat dari peran Amerika Serikat menjadi mediator lebih memudahkan mobilisasi politik Amerika Serikat dalam mendapat kepentingan ekonominya, dapat dilihat pula Amerika Serikat aktif melakukan banyak aktivitas diplomasi ekonomi seperti perdagangan senjata militer dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko, diplomasi dan kerjasama investasi perdagangan, teknologi dengan Uni Emirat Arab, Bahrain.

Tujuan Amerika Serikat yang berikutnya pula dalam kepentingan nasionalnya menjadi mediator di Abraham Accords yaitu kepentingan geopolitik Amerika Serikat, Amerika melakukan pola yang sama dalam melakukan diplomasinya dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab yaitu dengan mendukung dalam menekan pengaruh Iran serta penempatan militer dalam skala besar Amerika Serikat di Bahrain dan Uni Emirat Arab, disisi lain Amerika Serikat melakukan *Aid diplomacy* pulan dengan Sudan dan Maroko, yaitu pencabutan Sudan sebagai negara sponsor terorisme tetapi dengan syarat Sudan masuk dalam

Abraham Accords, Maroko pula yaitu adanya sebuah pengakuan wilayah Sahara Barat oleh Amerika Serikat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, tentunya penulis merasa penelitian ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang sempurna, penulis merasa bahwa penelitian ini terbatas pada referensi jurnal, dan juga penulis merasa bahwa penelitian ini mencakup aspek yang luas terkait *Abraham Accords* dari berbagai macam aktor politik di dalamnya yang terlibat langsung dalam *Abraham Accords* ini, sehingga beberapa hasil analisa masih terlalu umum.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian mendatang, agar dapat memperkecil kembali pembahasan, seperti contohnya yang dapat penulis gambarkan, yaitu membahas beberapa negara dalam *Abraham Accords*, agar hasil analisa yang didapatkan lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan. 2004. "Perkembangan Lobi Yahudi dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri dan Kongres Amerika Serikat." *Journal of the Humanities of Indonesia* Volume 6 (Oktober).
- Al Jazeera. 2021. "Sudan pays \$355m to US as compensation to victims of attacks." *AlJazeera*, April 1, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/1/sudan-pays-355-mn-to-us-in-deal-including-terror-list-removal/>
- Allison Minor, Daniel B. Shapiro, Amir Hayek, Loay Alshareef, Ahmed Khuzaie, Sarah Zaaimi. 2025. "The Abraham Accords at five." *Atlantic Council*, September 15, 2025. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-abraham-accords-at-five/>.
- Ambassador Robert E. Lighthizer on Retaliatory Duties. 2018. "USTR Issues Tariffs on Chinese Products in Response to Unfair Trade Practices." Office Of United States Trade Representative. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-issues-tariffs-chinese-products?>
- American Jewish committee. 2024. "On the Ground at the Republican National Convention: What's at Stake for Israel and the Middle East?" *American Jewish committee*, July 18, 2024.
- Anna L. Jacobs. 2021. "Abraham Accords Bring Stronger Trilateral Ties for Israel, UAE, and Morocco." *Arab Gulf Institute*, (May). <https://agsi.org/analysis/abraham-accords-bring-stronger-trilateral-ties-for-israel-uae-and-morocco/>.
- Anna Zakiah Derajat. 2022. "Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina." *Jurnal UNPAR*.
- Arvy Chrisando Lantang. 2023. "Sumber Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dibalik Penandatanganan Abraham Accords." *AEGIS Journal of International Relations*.
- Bureau of Economic Analysis. 2019. "2018 Trade Gap is \$621.0 Billion." [bea.gov. https://www.bea.gov/news/blog/2019-03-06/2018-trade-gap-6210-billion](https://www.bea.gov/news/blog/2019-03-06/2018-trade-gap-6210-billion).
- CBN.CO*. n.d. "Pat Robertson, Founder & Chairman." <https://cbn.com/article/not-selected/pat-robertson-founder-chairman?utm>.
- Chulanee Attanayake. 2018. "The RIMPAC Exercise and Evolving United States-Sri Lanka Military Relations Chulanee Attanayake." *Institute Of*

- Asian Studies National University Of Singapore*, (August), 2-4.
https://www.researchgate.net/publication/327011269_The_RIMPAC_Exercise_and_Evolving_United_States-Sri_Lanka_Military_Relations_Chulanee_Attanayake.
- Clerk of the House of Representatives Legislative Resource Center. 2023. *Lobbying Disclosure Act of 1995 (Section 5)*. N.p.: Lobbying Disclosure Act.
<https://lda.senate.gov/filings/public/filing/6cd74118-447b-49ae-9d7d-373cd7d1f41d/print/>
- Congressional Research Service. 2020. “Bahrain: Unrest, Security, and U.S. Policy.” *Congressional Research Service*, (September).
https://www.congress.gov/crs_external_products/RS/PDF/95-1013/95-1013.176.pdf?
- Congressional Research Service United States. 2020. “Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy.” *Congressional Research Service United States*, 11 23, 2020.
<https://www.congress.gov/crs-product/R44984?>
- Council Of Economic Adviser. 2019. “A Summary of the 2019 Economic Report of the President.” trumpwhitehouse.archives.gov.
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/summary-2019-economic-report-president/>.
- Council of Economic Adviser. 2019. “Deregulation Continues to Benefit American Consumers, Driving Economic Growth.” trumpwhitehouse.archive.gov.
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/deregulation-continues-benefit-american-consumers-driving-economic-growth/>.
- Dan William and Lisa Barrington. 2020. “-Israeli, U.S. officials land in UAE, Kushner urges Palestinians to negotiate.” *Reuters*, September 1, 2020.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/israeli-us-officials-land-uae-kushner-urges-palestinians-negotiate-2020-08-31/>.
- Defense Security Cooperation Agency. 2025. “United Arab Emirates – CH-47F Chinook Helicopters.” *dcs.mil*, May 12, 2025.
<https://www.dsca.mil/Press-Media/Major-Arms-Sales/Article-Display/Article/4182033/united-arab-emirates-ch-47f-chinook-helicopters>.
- George C. Marshall European Center for Security Studies. 2020. “The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?” *George C. Marshall European Center for Security Studies*, October, 2020.
<https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/abraham-accords-paradigm-shift-or-realpolitik?>
- Harvey Sicherman. 1990. “Palestinian Autonomy Self Government & Peace.” *Washington Institute*, 39-105.

- <https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/pdf/PalestinianAutonomySelfGovernmentandPeace.pdf.pdf>.
- Internal Revenue Service. 2025. "Tax Cuts and Jobs Act: A comparison for businesses." [irs.gov](https://www.irs.gov/newsroom/tax-cuts-and-jobs-act-a-comparison-for-businesses).
<https://www.irs.gov/newsroom/tax-cuts-and-jobs-act-a-comparison-for-businesses>.
- Jacob Magid. 2020. "Netanyahu greeted at White House by Israeli, pro-Palestinian demonstrators." *The Times Of Israel*, (September).
<https://www.timesofisrael.com/netanyahu-greeted-at-white-house-by-israeli-and-pro-palestinian-demonstrators/>.
- James Lankford. 2022. "LANKFORD, COLLEAGUES LAUNCH ABRAHAM ACCORDS CAUCUS." *lankford.senate.gov*, January 20, 2022.
https://www.lankford.senate.gov/news/press-releases/lankford-colleagues-launch-abraham-accords-caucus/?utm_source=chatgpt.com.
- Jay Solomon. 2021. "Biden Should Build on the Abraham Accords, Not Roll Them Back." *Washington Institute*, Januari 14, 2021.
<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/biden-should-build-abraham-accords-not-roll-them-back?>
- Jeffrey Heller. 2020. "Palestinians fire rockets at Israel, wounding two, during White House ceremony." *Routers*, September 16, 2020.
<https://www.reuters.com/article/world/palestinians-fire-rockets-at-israel-wounding-two-during-white-house-ceremony-idUSKBN2662YQ/>.
- Jennifer Morgan Hekking. 2020. "Morocco Dominates MENA Region in Purchases of US Arms." *Morocco World News*.
<https://www.moroccoworldnews.com/2020/09/66086/morocco-dominates-mena-region-in-purchases-of-us-arms/>.
- LM Rezky Rafi Athallah Rahim. 2023. "Dampak Dari Abraham Accord bagi Palestina dan Pandangan Negara Islam Timur Tengah Mengenai Perjanjian Tersebut." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*.
<https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/2588>.
- MADLINE ROACHE. 2020. "Time.co.id." *Trust in President Trump's Handling of International Affairs Low Across World, New Survey Finds*, Januari 8, 2020.
- Matthew Lee and Linley Sanders. 2023. "Most Americans view Israel as a partner, but fewer see it as sharing US values, AP-NORC poll shows." *APnews*, September 20, 2023.
<https://apnews.com/article/poll-israel-united-states-biden-netanyahu-41ba5cb189185f3e4956f4465c00999f>.
- Michael Elias Shamas. 2019. "Peace Above All Jimmy Carter, Moral Leadership, and the Camp David Accords." *Social Science Research Network*, (November).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3490602&.

- Middle East Institute. 2025. "Abraham Accords." *Middle East Institute*, (November). <https://www.mei.edu/publications/abraham-accords?>
- Mike Lawler. 2023. "REPS. LAWLER AND TORRES CELEBRATE HOUSE PASSAGE OF BIPARTISAN ABRAHAM ACCORDS SPECIAL ENVOY ACT." *lawler.house.gov*, Juni 13, 2023. <https://lawler.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=426>.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland. 2019. "Co-chairs' Statement on the Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East." *Website of the Republic of Poland*, February 14, 2019. <https://www.gov.pl/web/diplomacy/co-chairs-statement-on-the-ministerial-to-promote-a-future-of-peace-and-security-in-the-middle-east?>
- Oval Office. 2020. "Remarks by President Trump Announcing the Normalization of Relations Between Israel and the United Arab Emirates." *trumpwhitehouse.archive.gov*, August 13, 2020. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-announcing-normalization-relations-israel-united-arab-emirates/>
- Philip Zeliko, Graham Allison. 1999. "A Rigorous Model Of Action." In *Essence Of Decision Explaining The Cuban Missile Crisis*, 39. II ed. United States: Addison Wesley.
- Piero Gottardi and Claudio Mezzetti. 2023. "Shuttle Diplomacy." *Social Science Research Network*, (September). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4586599.
- "President Trump's Foreign Policy Towards the Middle East (2016-20): A Critical Analysis." 2021. *Pakistan Journal of American Studies* 1.
- Rachel Augustine Potter, Vincent Arel-Bundock J. 2015. "The Limits of Foreign Aid Diplomacy: How Bureaucratic Design Shapes Aid Distribution." *International Studies Quarterly* 59.
- Rick Scott. 2023. "Sen. Rick Scott Calls on Abraham Accords & Gulf Council Nations to Condemn Attacks, Stand Strongly with Israel." *Rickscott.senate.gov* (Florida), October 8, 2023.
- Ron Kampeas. 2022. "NY Rep. Bowman withdraws support for bill to promote Abraham Accords." *The Time Of Israel*, February 17, 2022. <https://www.timesofisrael.com/ny-rep-bowman-withdraws-support-for-bill-to-promote-abraham-accords/>.
- Sanam Vakil, Neil Quiliam. 2023. "The Abraham Accords and Israel-UAE normalization." *Chatham House*, (March). <https://www.chathamhouse.org/2023/03/abraham-accords-and-israel-uae-normalization/02-israel-uae-rapprochement-leading-abraham?>
- Track Aipac. n.d. <https://www.trackaipac.com>.
- Trump White House. 2018. "Remarks by President Trump and President Macron of France in Joint Press Conference." *Trump White House*, April 24, 2018.

- <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-macron-france-joint-press-conference/>.
- trump white house. 2020. "National Security & Defense." *trumpwhitehouse,archive.gov*, 2020. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/issues/national-security-defense/>.
- Trump White House. 2020. "Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatic and Friendly Relations." *Trump White House*, September 15, 2020. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/abraham-accords-declaration-peace-cooperation-constructive-diplomatic-friendly-relationships/>.
- trump white house. 2020. "Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of The Kingdom Of Morocco Over The Western Sahara." *trumpwhitehouse.gov*, December 10, 2020. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-western-sahara/>.
- U.S. Department of Commerce. 2017-2021. "Commerce Secretary Signs MOU Establishing U.S. Trade Zone in Kingdom of Bahrain." Commerce Secretary Signs MOU Establishing U.S. Trade Zone in Kingdom of Bahrain. <https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2021/01/commerce-secretary-signs-mou-establishing-us-trade-zone-kingdom-bahrain.html>?
- U.S. Department of Defense. 2017. "DoD Releases Fiscal Year 2018 Budget Proposal." *defense.gov*, May 23, 2017. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/1190216/dod-releases-fiscal-year-2018-budget-proposal/>.
- U.S. Department Of State. 2020. *Country Reports on Terrorism 2020: Sudan*. N.p.: state.gov. <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/sudan/>.
- U.S. Department Of State. 2020. "Former Secretary Pompeo's Travel to Israel, Sudan, Bahrain, and the United Arab Emirates." *U.S. Department Of State*, August 23, 2020. <https://2017-2021.state.gov/secretary-travel/travel-to-israel-sudan-bahrain-the-united-arab-emirates-and-oman-august-23-27-2020/?safe=1>.
- U.S. Department of State. 2021. "Secretary Pompeo's Meeting with Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates." *U.S. Department of State*, November 21, 2021.
- U.S. Department of State. n.d. "The Abraham Accords Declaration." state.gov. <https://www.state.gov/the-abraham-accords/>
- U.S. Department Of The Treasury. 2018. "Mnuchin And Mulvaney Release Joint Statement On Budget Results For Fiscal Year 2018." home.treasury.gov. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/>.

- U.S. Department Of The Treasury. 2020. "Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin Abraham Accords Dinner Keynote Address October 20, 2020." *U.S. Department Of The Treasury*, November 30, 2020. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1195?>
- Victoria Scoates. 2025. "Trump's landmark deal is the real key to peace in the Middle East." *Fox News*, July 8, 2025. <https://www.foxnews.com/opinion/trumps-landmark-deal-real-key-peace-middle-east>.
- William D Coplin. 2003. "Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan determinannya." In *Pengantar Politik Internasional*, 172. kedua ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- William D Coplin. 2003. "Kepentingan yang mempengaruhi." In *Pengantar Politik Internasional*. Edisi II ed. Bandung: Penerbit SINAR BARU Bandung.
- William D Coplin. 2003. "Konteks Internasional." In *Pengantar Politik Internasional*, 165-168. Edisi kedua ed. Bandung: Penerbit Sinar Bandung.
- William D Coplin. 2003. "Konteks Internasional." In *Pengantar Politik Internasional*, 167. Edisi Kedua ed. N.p.: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. "Mass Influencer." In *Pengantar Politik Internasional*, 88-89. II ed. Vol. II. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- William D .Coplin. 2003. "Partai yang mempengaruhi." In *Pengantar Politik Internasional*, 84. edisi kedua ed. Bandung: Penerbit sinar Bandung.
- William D Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional*. II ed. N.p.: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional*. II ed. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional*. II ed. N.p.: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional Kapasitas Penggunaan Militer*. II ed. N.p.: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional Konteks Internasional*. II ed. N.p.: Sinar Baru Bandung.
- William D Coplin. 2003. "Perilaku pengambilan keputusan." In *Pengantar Politik Internasional*, 33. II ed. Bandung: Sinar Baru Bandung.